

**Tenggelamnya
Mutiara Hitam Lampung:
Lada Ke Kopi Era Kolonial
di Kabupaten Tanggamus**

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada Ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten Tanggamus

Muhammad Rizkillah | Fera Verianti
Hilman Rifqi | Yusuf Perdana

Alilmron
Pustaka Keluarga Pilihan

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**TENGGELAMNYA MUTIARA HITAM LAMPUNG:
LADA KE KOPI ERA KOLONIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Penulis

Muhammad Rizkillah | Fera Verianti
Hilman Rifqi | Yusuf Perdana

Editor

Yusuf Perdana

Desain Cover & Layout

PAI Creative

xiv + 84 hal : 14 x 21 cm
Cetakan Oktober 2020

ISBN:

Penerbit

Pustaka Ali Imron

Perum Polri Haji Mena
Natar Lampung selatan

HP. 0822 8214 8711

email : pustakaaliimron@gmail.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ucapan Terima kasih

Buku *Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung* ini adalah salah satu bentuk penulisan sejarah lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar sejarah maupun menambah wawasan masyarakat umum dari bantuan dana penelitian PKM-PSH (Program Kreativitas Mahasiswa bidang penelitian sosial humaniora) yang bersumber dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2020.

Tulisan ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan terimakasih kepada bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing dan editor dalam penulisan buku yang berjudul “*Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten Tanggamus*“ ini yang dengan sabar membimbing kami, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Karomani, M. Si, Prof. Dr. Patua Raja selaku Dekan FKIP, bapak Henry Susanto, S.S., M.Hum. selaku ketua prodi pendidikan sejarah FKIP UNILA beserta Bapak/Ibu dosen

program pendidikan sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah mengajarkan ilmunya kepada tim penulis.

Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Arsip Nasional, Dinas Kearsipan Daerah Lampung, Museum Transmigrasi Provinsi Lampung, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung juga untuk semua penulis buku, makalah, artikel, jurnal, dan berita yang tercantum dalam daftar pustaka. Ucapan Terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus yang memperbolehkan kami melakukan penelitian untuk mengangkat nama baik Kabupaten Tanggamus itu sendiri seperti bapak Masmu'i.

Terimakasih atas dukungan dan semangat dari kedua orang tua Bapak Sandianto dan Ibu Sriani; Bapak Ismail dan Ibu Mislina Indah yang tidak pernah putus mendukung, menyemangati, dan selalu mendoakan kami. Juga kepada semua pihak, sahabat dan teman-teman tersayang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan Kepercayaan dan amanah penulisan buku sejarah lokal ini kepada kami.

Tim Penulis

Kata Pengantar

Buku *Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung : Lada Ke Kopi Era Kolonial Di Kabupaten Tanggamus* ini membicarakan tentang penyebab beralihnya komoditi unggulan era kolonial yaitu lada ke kopi di Kabupaten Tanggamus. Pengaruh adanya peralihan lada ke kopi tidak lepas dari campur tangan para kolonial yang berusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya dipasaran eropa dari hasil bumi Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus. Lampung merupakan daerah penghasil sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi salah satunya di bidang perkebunan. Perkebunan yang terkenal di Lampung adalah perkebunan kopi, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti bahwa Lampung merupakan Daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kopi-kopi yang di jual belikan tersebut merupakan kopi-kopi yang berasal dari daerah-daerah salah satunya Tanggamus dengan hasil produksi mencapai 36.520 ton.

Sebelum kopi menjadi primadona masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Tanggamus, lada terlebih dahulu menjadi komoditas andalan di Provinsi Lampung Sejak zaman

Kesultanan Banten hingga era kolonial. Ketika dibentuknya undang-undang agraria yang membuat Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing sehingga banyak perkebunan-perkebunan muncul di berbagai wilayah Indonesia. Dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat ketika tanaman lada mulai bersaing dengan tanaman ekspor lainnya sehingga sekitar abad ke 19 lada bukan lagi menjadi komoditi utama namun, harga jual tetap bertahan dipasaran eropa. Seiring berjalannya waktu lada Lampung mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tanaman lada diserang penyakit kuning yang disebabkan oleh kondisi tanah yang kurang subur, kekurangan pupuk serta kekeringan. Sehingga seiring berjalannya waktu tanaman lada digantikan oleh kopi karena minat masyarakat yang beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan dan perawatan yang lebih mudah sehingga masyarakat beralih ke tanaman kopi.

Hal ini menjadi keunikan tersendiri dalam sejarah peralihan tanaman primadona yang berada di Lampung Khususnya Kabupaten Tanggamus. Oleh sebab itu buku yang ditulis oleh saudara Muhammad Rizkillah, Fera Verianti, Hilman Rifqi, dan Yusuf Perdana adalah hasil dari Program Kreatifitas Mahasiswa bidang penelitian sosial humaniora (PKM-PSH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan merupakan salah satu studi yang cukup lengkap mengenai pembahasan tentang peralihan tanaman lada ke kopi era kolonial di Kabupaten Tanggamus. Adapun keunikan lain dari buku ini yaitu banyaknya sumber-sumber yang berasal dari Arsip Nasional, Dinas Kearsipan Provinsi Lampung, Museum Transmigrasi Lampung, serta Dinas Perpustakaan Daerah Lampung. Secara

akademisi buku ini dapat digunakan sebagai referensi guru dalam mengajar sejarah dan untuk masyarakat umum dapat digunakan untuk menambah wawasan serta informasi mengenai sejarah peralihan tanaman unggulan lada ke kopi era kolonial di Kabupaten Tanggamus. Melalui buku ini juga, harapannya masyarakat dapat disadarkan bahwa lada pernah menjadi komoditi utama masyarakat Tanggamus sebelum digantikan oleh kopi, sebagai sumber referensi untuk para peneliti lainnya yang akan meneliti tentang perkebunan di Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus. Menambah referensi Sejarah lokal Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I SELAYANG PANDANG	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan	4
C. Lingkup Penulisan	4
D. Metodologi Penulisan	5
E. Teknik Pengumpulan data	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II SEJARAH DAN KONDISI PERKEBUNAN

ERA KOLONIAL SAMPAI MODERN DI

LAMPUNG	9
A. Sejarah Dan Kondisi Lampung.....	9
B. Krisis Malaise	18
C. Perkebunan Era Kolonial Hingga Modern di Lampung	21

BAB III DAMPAK PERUBAHAN KOMODITAS LADA

KE KOPI DI LAMPUNG	55
A. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Komoditas.....	55
B. Dampak Perubahan Komoditas di Lampung.....	57

BAB IV PENUTUP

67

Daftar Pustaka

69

Glosarium

73

Indeks.....

76

Tentang Penulis.....

78

Daftar Tabel

Tabel 1.	Sensus Penduduk Tahun 2016 Di Kabupaten Tanggamus	12
Tabel 2.	Produksi Lada Hitam Lampung 1857-1859.....	35
Tabel 3.	Produksi lada tahun 1859-1866	36
Tabel 4.	Produksi Lada di Sumatera tahun 1913.....	36
Tabel 5.	Perdagangan Lada Lampung selama Tahun 1890 sampai 1918	37
Tabel 6.	Produksi Kopi Di Lampung Dalam Rentang Periode 1923-1929.....	43

Daftar Gambar

Gambar 1	Perkebunan Lada Di Lampung	28
Gambar 2	Atlas wilayah Lampung dan Sumatera bagian selatan	41
Gambar 3	Pembangunan Saluran Air Di Bendungan, Untuk Irigasi Koloni Pertanian Jawa Di Metro, Distrik Lampung	51
Gambar 4	Museum Nasional Ketransmigrasian Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.....	54
Gambar 5	Kegiatan Minum Kopi Masyarakat Indonesia.....	60
Gambar 6	Ritual Memberikan Sesajen Pada Kyai Petruk	63

Bab I

Selayang Pandang

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung terkenal dengan hasil perkebunannya, komoditas utama di Lampung saat ini adalah kopi. Menurut Budiman (2012 : 528) Daerah Lampung hingga saat ini adalah daerah pengekspor kopi terbesar di Indonesia bahkan mencapai 70% dari keseluruhan ekspor kopi di seluruh Indonesia. Salah satunya Kabupaten Tanggamus sebagai daerah penyumbang kopi terbesar di Provinsi Lampung. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis dan iklim yang mendukung perkebunan kopi. Sebelum kopi menjadi primadona masyarakat Lampung saat ini, lada terlebih dahulu menjadi komoditas andalan di Provinsi Lampung sejak zaman Kesultanan Banten hingga era kolonial, bahkan Lampung pernah menjadi salah satu penghasil lada terbesar di Nusantara. Lada Lampung tidak terlepas dari kekuasaan Kesultanan Banten, yang mana Banten melakukan kontrol yang kuat atas daerah-daerah penghasil lada seperti Lampung,

Palembang, Bengkulu dan Jambi. Sementara Lampung dalam waktu yang cukup lama dipengaruhi oleh kesultanan Banten bahkan menjadi surplus lada pada kesultanan Banten. Dahulu pusat penanaman lada di Lampung berada di daerah Tulang Bawang, Semaka (Tanggamus), Seputih, Sekampung, dan Teluk Betung (Imadudin, 2016 : 350). Namun, pada abad ke-19 lada sudah tidak lagi menjadi komoditas utama walaupun tetap penting bagi Belanda (Kristian, 2019 : 110). Selanjutnya, kopi mulai ditanam di Tanggamus sebagai tanaman pengganti lada dan berkembang sampai sekarang. Tanaman kopi menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Tanggamus. Varietas kopi yang terkenal di Tanggamus adalah *Robusta*.

Kopi masuk di Tanggamus diperkirakan beriringan dengan adanya program politik etis melalui kegiatan kolonialisasi yang berlangsung pada Tahun 1905-1911. Para kolonis asal Jawa dan keturunan China membuka lahan dan mengembangkan tanaman Kopi (Budiman, 2012 : 528). Tanah Tanggamus yang terkenal luas dan subur memungkinkan para kolonis dengan mudah membudidayakan kopi di Tanggamus dengan jumlah yang besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Tanggamus. Hingga saat ini Tanggamus menjadi sentral komoditas kopi di Lampung dengan luas lahan sekitar 44.330 hektar dan hasil produksi yang mencapai 36.520 ton (Lestari, 2017 : 1).

Pembukaan lahan hutan untuk pertanian sangat terbatas, maka budi daya komoditas beralih pada tata guna lahan pertanian yang bergeser secara dinamis, yaitu antar komoditas dengan lahan yang sesuai untuk saling berdampingan terhadap komoditas tradisional di suatu wilayah, ketika dapat bergeser atau diganti oleh komoditas

yang baru dikembangkan maka luas areal semakin berkurang (Daras dalam Sudarsono, 2019 : 116). Sejalan dengan Daras, Masmu'i mengatakan bahwa peralihan komoditas lada ke kopi yang terjadi di Tanggamus diakibatkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari minat petani yang berubah karena mudahnya lada terserang hama, permintaan pasar yang semakin berkurang, dan harga komoditas lada di pasaran yang menurun hingga berdampak pada pendapatan petani ikut menurun (Wawancara dengan Bapak Masmu'i petani lada dan kopi di Tanggamus, pada tanggal 9 November 2019). Hal serupa juga kemungkinan dirasakan oleh pihak kolonial Hindia-Belanda sehingga mengganti perkebunan lada menjadi perkebunan kopi, Lada sendiri pada era kolonial disebut sebagai mutiara hitam.

Setelah mengetahui peralihan komoditas yang ada di Kabupaten Tanggamus, terdapat akibat yang dihasilkan yakni berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, peta persebaran lada yang ada di Kabupaten Tanggamus, serta berubahnya permintaan pasar terhadap komoditas yang ada di Kabupaten Tanggamus. Menyadari pentingnya peralihan komoditas yang berdampak pada segi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanggamus pada era kolonial, maka peneliti akan mengkaji dalam sebuah buku penelitian yang berjudul “Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten Tanggamus”.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan dalam rangka sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peralihan lada ke kopi pada era kolonial di Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui proses peralihan komoditas lada ke kopi pada era kolonial di Kabupaten Tanggamus.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat peralihan komoditas ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi.

C. Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Subjek penelitian : Lada dan kopi di Kabupaten Tanggamus.
2. Objek penelitian : Peralihan komoditas lada ke kopi di Kabupaten Tanggamus.
3. Penelitian dilakukan daring : Dinas Kearsipan Nasional, Dinas Kearsipan Daerah Lampung, Dinas Transmigrasi Pesawaran, dan Dinas Perpustakaan Daerah.
4. Waktu penelitian : 2020.
5. Bidang ilmu : Sejarah.

D. Metodologi Penelitian

Metode ada kaitannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis, dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007 : 12). Metode penelitian adalah cara atau proses yang digunakan secara sistematis dalam disiplin ilmu untuk tujuan objek (bahan-bahan) yang diteliti. Metode yang penulis pakai dalam penelitian buku ini adalah Metode historis adalah yaitu suatu proses pengumpulan dan pengolahan suatu bahan yang telah ditulis yang berisi tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian dimasa lampau yang disusun melalui proses ilmiah secara kronologi, sistematis dan saling berkaitan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menempuh penelitian ini adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Notosusanto, 1984 : 36), yang dapat dijelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yaitu :

- Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Sumber primer yang sudah didapatkan adalah buku karya Sudarsono dan Erwanto yang berjudul Revitalisasi Lada Lampung Sebagai komoditas warisan serta Buku karya Kristian yang berjudul Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942, untuk memperdalam sumber primer dan sekunder, maka peneliti mencari dan mengumpulkan sumber data lainnya dari perpustakaan dan arsip zaman kolonial tentang perkembangan lada dan kopi di Lampung khususnya Tanggamus. Mencari dan mengumpulkan data dari media massa. Mencari Informasi melalui dinas perkebunan. mencari dan mengumpulkan

data dari informan melalui wawancara serta melakukan observasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan media elektronik yaitu internet dalam mengumpulkan bahan-bahan kajian penelitian.

- Kritik adalah menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu dan apakah dapat digunakan atau sesuai dengan tema dalam penelitian, kritik dalam penulisan sejarah dibagi menjadi dua yaitu kritik internal dan kritik eksternal.
 - a. Kritik intern, yaitu kritik yang dilakukan untuk menilai kredibilitas (kebenaran) isi sumber data yang dilakukan dengan cara membandingkan isi sumber tersebut dengan bukti lainnya.
 - b. Kritik ekstern, yaitu kritik yang dilakukan untuk memulai keaslian sumber data yang didapatkan dalam hal ini dilakukan analisis terhadap bentuk luar dari sumber data tersebut. Proses ini dilakukan peneliti dengan memilah-milah dan menyesuaikan data yang penulis dapatkan dari heuristik dengan tema yang akan peneliti kaji, dan arsip atau data yang diperoleh peneliti telah diketahui keasliannya. Setelah itu peneliti memverifikasi data tersebut apakah data tersebut layak atau tidak dalam menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan.

- Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal. Menganalisis data dan fakta yang telah diperoleh untuk selanjutnya menghubungkan fakta-fakta tersebut sehingga terbentuk konsep sejarah.
- Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk sebuah tulisan, dalam hal ini peneliti membuat hasil penelitian berupa buku dari apa yang didapatkan peneliti yakni *Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung : Lada ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten Tanggamus*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti maka, peneliti menggunakan Teknik Kepustakaan yakni mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, dan lain sebagainya. yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Koentjaraningrat menyatakan bahwa studi pustaka merupakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material misalnya, koran, naskah, majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagai yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1997 : 159). Mengingat pentingnya teknik kepustakaan ini, maka melalui studi pustaka ini peneliti berusaha mengumpulkan berbagai macam informasi yang menunjang penyelesaian masalah, selain itu melalui studi pustaka ini terdapat teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang akan dapat dianalisis oleh peneliti dan akan dijadikan landasan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan kajian, buku ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah **Selayang pandang**. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, Lingkup Penulisan, Metodologi Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua adalah **Sejarah dan Kondisi Perkebunan Era Kolonial Sampai Modern di Lampung**. Bab ini berisi Sejarah Dan Kondisi Lampung, Krisis Malaise, dan Perkebunan Era Kolonial Hingga Modern di Lampung

Bab Tiga adalah **Dampak Perubahan Komoditas Lada ke Kopi di Lampung**. Bab ini berisi Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Komoditas dan Dan Dampak Perubahan Komoditas di Lampung.

Bab Lima adalah **Penutup**. Bab ini berisi Daftar Pustaka, Glosarium, Indeks dan Tentang Penulis.

Bab II

Sejarah dan Kondisi Perkebunan Era Kolonial Sampai Modern di Lampung (Tanggamus)

A. Sejarah Dan Kondisi Lampung

Lampung adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung merupakan daerah paling selatan Pulau Sumatera. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak antara 3054° Lintang Selatan dan 103050° – 105050° Bujur Timur dengan luas wilayah $35,376,50$ km². Ibukota Provinsi Lampung terletak di Bandar Lampung. Berdasarkan letak Astronomis nya, kedudukan Provinsi Lampung berada di sebelah selat garis khatulistiwa, oleh sebab itu memiliki iklim tropis dengan curah hujan sepanjang tahun serta kelembapan udara yang cukup tinggi. Temperatur udara berkisar antar $22-33^{\circ}$ Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 80%-88%.

Kondisi klimatologi tersebut memungkinkan daerah-daerah di Provinsi Lampung mempunyai iklim yang optimum bagi pengembangan sektor usaha pertanian dan perikanan secara ekonomis (Ali Imron, 2016 : 9).

Dengan kondisi alam yang ada di Lampung menyebabkan lahan-lahan pertanian dan perkebunannya menjadi subur, oleh karenanya menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di Provinsi Lampung salah satunya adalah perkebunan kopi. Sebagai penghasil kopi tersohor di Indonesia, Lampung memiliki daerah desentralisasi penghasil kopi terbesar salah satunya yaitu Kabupaten Tanggamus. dimana kopi menjadi andalan pemasukan bagi Kabupaten Tanggamus. Tetapi sebelum kopi mendominasi wilayah perkebunan di Tanggamus, lada lebih dulu dikenal dan menjadi komoditas utama perkebunan di Tanggamus. Sehingga dari pemahaman diatas kami akan meneliti bagaimana peralihan komoditas lada ke kopi di Kabupaten Tanggamus era kolonial.

a) Letak Geografis Tanggamus

Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terbentuk melalui pemekaran Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri, yang secara geografis terletak pada posisi $104^{\circ} 18'$ - $105^{\circ} 12'$ Bujur Timur dan $05^{\circ} 05'$ - $05^{\circ} 56'$ Lintang Selatan Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat berbataasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah 2.855,46 km² untuk luas daratan ditambah dengan daerah laut seluas 1,799,50 km² dengan luas keseluruhan 4,654,98 km², dengan topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter (Tanggamus.go.id).

b) Kondisi Demografi Tanggamus

Kondisi geografis yang subur menyediakan modal bagi kehidupan masyarakat sehingga tanah Tanggamus dapat digunakan sebagai rumah harapan bagi penduduk asli maupun pendatang.

Dari hasil sensus penduduk Tahun 2016 di Kabupaten Tanggamus diperoleh data sebagai berikut :

KECAMATAN	LAKI-LAKI (Male)	PEREMPUAN (Female)
Wonosobo	17974	16675
Semaka	18350	16875
Bandar Negeri Semuong	10281	9118
Kota Agung	21461	20457
Pematang Sawa	9061	7578
Kota Agung Barat	12655	11182
Kota Agung Timur	9833	9292
Pulau Panggung	17835	16813
Ulu Belu	23619	20788
Air Naningan	16037	14138
Talang Padang	22502	21873
Sumberjo	16793	15925
Gisting	19937	18925
Gunung Alip	9310	8655
Puggung	27644	25768
Bulok	10962	9986
Cukuh Balak	12274	10597
Kelumbayan	5814	5016
Limau	9364	8228
Kelumbayan Barat	7498	6801
TANGGAMUS	299214	274609

Tabell : Sensus penduduk tahun 2016 dikabuapten Tanggamus,
Sumber : BPS 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Tanggamus sebanyak 573,823 yang terdiri 299.214 laki-laki dan 274.609 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Pugung yang berjumlah 53.412 sedangkan jumlah penduduk paling sedikit merupakan Kecamatan Kelumbayan yang berjumlah 10.830.

c) Sejarah Kabupaten Tanggamus

Sejarah perkembangan wilayah Tanggamus, menurut catatan diawali pada Tahun 1889 pada saat Belanda mulai masuk di wilayah Kota Agung pada waktu itu pemerintahan dipimpin oleh seorang kontroiler yang memerintah di Kota Agung. Serta dibagi menjadi lima marga yang dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa kampung (Supendi dkk, 2007 : 11). Pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan adat atau marga. Kemudian pada Tahun 1964 Pemerintah dan Kewedanan dihapuskan yang selanjutnya Pemerintah Negeri juga dihapuskan pada Tahun 1971 (Pemerintah Kabupaten Tanggamus : 2019).

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatas rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan pembantu Bupati Lampung Selatan untuk wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan, 7 perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa, 3 Kelurahan serta 4 Desa Persimpangan. Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk serta menjadi salah satu dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten

Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada Tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada Tanggal 21 Maret 1997 (Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2008 : 11).

d) Masa Kesultanan Banten

Pada abad ke- 15 Banten mulai menjalin hubungan kerjasama dan memperluas kegiatan ekonominya ke daerah Lampung. Lampung pada saat itu (abad ke XV), bukan merupakan suatu kerajaan atau satu kesatuan daerah yang dikuasai oleh raja, yang ada hanyalah kesatuan masyarakatan kecil yang disebut kebuayan (Muliandi, Tt : 2). Daerah Tanggamus ketika itu pemerintahannya dipegang oleh kepala adat atau marga. Hubungan Tanggamus dengan Banten semakin akrab terutama setelah Islam diterima dengan tangan terbuka. Sebagai wilayah yang dikuasai, Sultan Banten melakukan eksploitasi ekonomi, khususnya dalam tata niaga lada. Penarikan lada dari Lampung terus diintensifikan. Kebijakan ini dilakukan sultan setelah produksi lada di Banten mengalami penurunan pada abad ke-17, sementara kebun lada di Lampung terus bertambah (Ota, 2015 : 171).

Sultan mengeluarkan berbagai piagam (*pijagem*) yang berisi sejumlah peraturan yang mengikat. Pada Tahun 1653 Sultan Ageng mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penduduk Lampung menanam lada 500 pohon per-orang, dan menjualnya pada pembeli tanpa memandang kebangsaannya. Orang Jawa, Cina, Inggris, atau Belanda dapat membeli lada secara bebas (Imadudin, 2016 : 364).

Sebagai bentuk pengendalian terhadap tata niaga lada, penguasa Banten menempatkan jenjen atau jenang di Semaka (Tanggamus). Karena hanya berurusan dengan soal lada, jenjen tidak mencampuri urusan pemerintahan. Tugas utama jenjen adalah mengelola penerimaan lada dari Lampung dan mendistribusikannya ke Bandar Banten. Selanjutnya Sultan Banten menugaskan para punggawa sebagai wakilnya di Tulang Bawang, Sekampung, dan Semaka (Imadudin, 2016 : 353).

e) Masa VOC

Ketenangan masyarakat Lampung mulai terusik ketika perusahaan dagang Belanda (VOC) berkeinginan pula mengadakan hubungan dagang langsung ke bandar di daerah Lampung. Hal itu bisa dimengerti karena selama ini VOC membeli hasil-hasil bumi Lampung di Bandar Banten yang harganya lebih tinggi. Untuk lada hitam misalnya di Banten berharga sekitar 15 real padahal di Lampung hanya sekitar 7 atau 8 real. VOC mengandalkan konflik internal untuk menguasai Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mengalami kemunduran ketika timbul perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya dengan nama Sultan Haji. Tanggal 14 Maret 1683 VOC menangkap Sultan dan di penjarakan di Batavia sampai meninggal tahun 1692. Penangkapan itu telah mengakhiri peperangan Banten melawan VOC sehingga secara resmi VOC menguasai wilayah Banten termasuk Lampung. Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten pada tahun 1682. Atas bantuannya melawan pasukan Ki Ageng Tirtayasa, VOC mendapatkan izin untuk berdagang secara langsung dengan penduduk Lampung (Masroh, 2015 : 67).

Setelah konflik internal yang ada di Banten akhirnya VOC menguasai Lampung. VOC mulai mengeksploitasi perdagangan rempah-rempah yang ada di Lampung khususnya Tanggamus. Seiringnya waktu VOC mengalami kebangkrutan dan bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Kelanjutannya terbentuk pemerintahan Belanda yang memihak pihak Perancis dalam perang Eropa.

f) Masa Hindia Belanda

Pada Tahun 1807 Belanda memproklamkan bahwa seluruh Hindia Belanda (Nusantara) menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan sebagai wakil kerajaan diangkat Gubernur Jendral H.W. Deandles berkedudukan di Batavia. Deandles bertugas dari tahun 1808-18011. Tetapi rencana-rencana Deandles menata pemerintahan tidak berjalan lancar karena pada tanggal 18 September 1811, Lord Minto, panglima pasukan Inggris bersama bersamanya menyerahkan seluruh kekuasaannya di Hindia Belanda. Piagam penyerahan ini dinamakan piagam Tuntang. Pada tanggal 1814, Inggris menyerahklan kembali seluruh kepulauan Nusantara kepada kerajaan Belanda (Hamzah, 1997 : 12).

Tahun 1816 Belanda mengambil kembali wilayah kekuasannya di Nusantara. Pada tahun itu juga di Lampung diangkat seorang asisten residen yang berada di bawah Residen Banten yaitu Kruseman. Pada tahun 1817 asisten residen ditempatkan di Teluk Betung (Masroh, 2015 : 69). Pada awal kedatangannya Belanda tidak disambut dengan baik.

Berbagai perlawanan terjadi di Lampung dan konflik-konflik yang ada membuat Belanda harus meredam perlawanan tersebut. di wilayah Tanggamus persiapan-persiapan “menyambut” Kolonial Belanda segera dilakukan oleh kepala-kepala Marga setempat. Perlawanan rakyat Tanggamus meledak pada tahun 1828 dibawah pimpinan Batin Mangunang. Dalam usaha untuk menunnjang keberhasilan dalam melakukan perlawanan Batin Mangunang tidak hanya mengandalkan pada senjata dan para prajuritnya tetapi juga berusaha bekerjasama dengan berbagai pihak. Setelah terjadinya pertempuran di Teluk Betung daerah tersebut menjadi kekuasaan prajurit-prajurit Batin Mangunang. Jatuhnya Telukbetung ketangan pejuang Lampung membuat gelisah pihak Belanda. Sehingga Pemerintah Belanda berkeinginan untuk memulihkan kembali kedudukan Belanda yang terancam di Lampung. Ekspedisi ini Dibawah pimpinan Kapten Hoffman ke wilayah Tanggamus. Kedatangan pasukan Belanda ini ternyata sudah tercium oleh pasukan Batin Mangunang. Kapten Hoffman kemudian memasuki Kampung Benawang di Negara Ratu teteapi tidak ada perlawanan dari rakyat daerah tersebut karena kampungnya telah dikosongkan.

Anggapan Belanda setelah penyerbuan di Lereng Tanggamus telah selesai ternyata salah. Sikap Batin Mangunang yang tidak suka cara-cara diplomasi yang diajukan pihak Belanda membawa keuntungan tersendiri sehingga sampai akhir hayatnya ia tidak tertangkap ataupun terbunuh oleh pasukan Belanda. Batin Mangunang wafat karena sakit dan anaknya yang bernama Dalem Mangkunegara meneruskan perjuangan ayahnya (Mustika Dewi, Tt : 9).

Seiring berjalannya waktu Belanda dapat meredam perlawanan-perlawanan di Lampung. Sejak 1856 Belanda berkuasa secara penuh atas wilayah Lampung. Kemudian Belanda mulai lagi menata pemerintahan kolonialnya di Lampung. Penataan pemerintahan di Lampung sebagai sebuah Afdeling yang dikepalai oleh residen diteruskan. Memasuki abad ke 20, keadaan pemerintahan Belanda di Lampung semakin membaik. Perlawanan-perlawanan rakyat semakin berkurang sehingga Belanda dapat lebih memikirkan pembangunan untuk kepentingan jalan, perkebunan dan lain-lain termasuk melaksanakan program kolonisasi.

B. Krisis Malaise

Malaise melanda dunia sejak Tahun 1929, dengan puncaknya 1930, yang berawal dari jatuhnya bursa saham di Wall Street, New York, Amerika Serikat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Hindia Belanda. Malaise muncul akibat perbedaan besar antara kapasitas produksi dan kemampuan konsumsi produk-produk tersebut oleh masyarakat dunia (Irwanto,D 2017: 60).

Ada teori yang mengartikan krisis dari dua sudut pandang, yaitu menurut teori idealisme dan teori determinisme materialistis. Menurut teori idealisme, krisis adalah refleksi dari disintegrasi mental dan spiritual yang disebabkan oleh konflik ideologis yang fundamental. Sedangkan menurut teori determinisme materialistis, krisis timbul sebagai akibat perjuangan kelas yang ditimbulkan oleh perubahan sistem produksi berdasarkan teknologi baru.

Krisis *malaise* merupakan krisis yang terjadi pada Tahun 1929. Krisis ini biasa orang menyebutnya zaman meleset, karena segala usaha pada zaman itu tidak ada yang berhasil atau meleset. Perang Dunia I menimbulkan kekacauan ekonomi yang luar biasa di dunia, Eropa, Amerika, bahkan sampai ke Hindia Belanda.

Nasionalisme ekonomi menciptakan bea masuk yang tinggi dan menghentikan perdagangan internasional, maka timbullah kelebihan produksi di beberapa negara seperti USA, Brazilia, Canada, sehingga terjadilah kekurangan di negara lain. Kelebihan produksi mengakibatkan tertutupnya pabrik-pabrik dan menimbulkan pengangguran, akhirnya meletus dalam depresi ekonomi Tahun 1923 dan Tahun 1929-1930 yaitu masa *malaise* (Soebantardjo dalam Perdana. Y dkk, : 239).

Krisis *Malaise* ini berdampak parah terhadap perkebunan-perkebunan Belanda hingga menjadi benar-benar jatuh serta tingkat produksi perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial menurun secara drastis. Hampir semua komoditas-komoditas perkebunan yang laku keras di pasar ekspor mengalami penurunan yang cukup parah, karena selain komoditi perkebunan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan perang, perkebunan-perkebunan ini juga mengalami masalah yang sama, yaitu *Malaise*. Permintaan akan komoditi di pasaran dunia mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan perang, hal ini berdampak terhadap jumlah produksi perkebunan yang cenderung menurun Padahal sebelum krisis *malaise*, pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda sedang mengalami kenaikan secara signifikan.

Secara geografis perkebunan di Hindia Belanda terbagi menjadi dua wilayah besar yang pertama yaitu perkebunan kolonial yang ada di Pulau Jawa dan perkebunan kolonial yang ada di Sumatra Timur, dua lokasi utama perkebunan kolonial tersebut menghasilkan berbagai jenis tanaman keras, contohnya seperti tanaman jenis tebu, kopi, karet, teh, dan tembakau, sedangkan untuk komoditi perkebunan yang ada di Sumatera Timur sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, jenis tanaman yang ditanam di perkebunan kolonial di Sumatera Timur antara lain tembakau, teh, karet, dan kelapa sawit. Sebelum *malaise* melanda, komoditi tebu dan kopi mendominasi ekspor hasil perkebunan Hindia Belanda.

Dominasi tebu sebagai komoditi primadona pada masa ini dibuktikan dengan luasnya ekspansi dan luas areal lahan yang di Tanami tanaman tebu ini. Terhitung dimulai dari Tahun 1900 sampai dengan Tahun 1925 tanaman tebu selalu mengalami perluasan lahan yang ditanami, selain tebu tanaman yang juga sempat mendominasi adalah kopi (Siswoyo. T dkk 2017 : 8)

Dampak utama depresi terhadap Hindia Belanda dapat dibagi menjadi empat: Hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional; munculnya masalah dalam perusahaan perkebunan utama seperti karet, gula, dan kopi; krisis keuangan yang disebabkan berkurangnya penerimaan dan pendapatan pemerintah kolonial; menurunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Lebih dari 300.000 kesempatan kerja hilang, sehingga dapat dikatakan stimulus ekonomi yang telah diciptakan sejak 1900 hancur seketika.

Sektor perkebunan yang dulunya menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan, kini justru menjadi sumber masalah. Meskipun demikian, pajak langsung terutama pajak tanah tetap tidak dipotong, dengan demikian masyarakat tetap harus memutar otak untuk membayar tanggungan pajak. Perkebunan kopi yang termasuk salah satu komoditi utama juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan gula. Tercatat pada Tahun 1930 luas areal yang ditanami kopi adalah 97,520 hektar, namun setelah krisis menerpa berkurang menjadi 96,460 hektar pada tahun 1935. Krisis yang melanda hampir diseluruh dunia bahkan Indonesia sangat berakibat pada pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia, hingga membuat hampir disetiap kapasitas produksi mengalami kelumpuhan. Melihat begitu besar dampak dari krisis ini dan penting sekali keterkaitan antara peralihan komoditas yang ada dilampung khususnya lada dan kopi dengan krisis *malaise*.

C. Perkebunan Era Kolonial Hingga Modern di Lampung

Lampung merupakan pintu gerbang menuju ke wilayah Sumatera, sehingga wilayah ini merupakan wilayah yang strategis dan menjadi jalur lalu lintas perdagangan dan ekonomi antara Jawa dan Sumatera. Ramainya aktivitas ekonomi dan perdagangan di Provinsi Lampung bukan terjadi pada masa kini saja tetapi Lampung juga telah memainkan peran penting sebagai salah satu pemasok sumber daya alam bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda khususnya dalam bidang perkebunan. Berdasarkan catatan J. W. J. Wellan wilayah Karesidenan Lampung ketika itu merupakan penghasil utama bagi komoditas lada, kemenyan, kopi, kayu hasil hutan, kopra, dan rotan (Ariwibowo, 2018 : 346).

Sejarah perkebunan di Indonesia dimulai pada Tahun 1870 dengan diumumkannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*). UU tersebut dikeluarkan dengan maksud mengundang modal swasta beroperasi di Indonesia untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang banyak diminta di pasar dunia terutama pasar eropa, seperti gula, kopi, karet, dan tembakau. Hadirnya perkebunan di tanah jajahan tidak terlepas dari adanya politik kolonial yang dijalankan penjajah. Menurut Djoko Suryo (1986), pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, ada dua aliran yang sangat berpengaruh dalam proses intensifikasi sistem pemerintahan kolonial dan penetrasi ekonomi kapitalis Barat di tanah jajahan, yaitu aliran politik kolonial konservatif dan liberal. Kedua aliran itu, konservatif dan liberal, berbeda dalam merumuskan sistem kebijaksanaan politik dalam menggali tanah jajahan. Haluan politik yang pertama cenderung mengutamakan negara sebagai penanggung jawab penggalian sumber perekonomian tanah jajahan di samping sebagai pengelola administrasi pemerintahan negara. Di pihak yang lain haluan yang kedua, yaitu aliran liberal, menghendaki pemisahan tegas antara sektor pemerintahan dan sektor perekonomian. Menurut aliran ini negara perlu membatasi diri dalam sektor administrasi pemerintahan negara, sedangkan sektor penggalian sumber perekonomian perlu diserahkan kepada swasta. Hal ini kemudian diwujudkan dengan dibukanya perkebunan-perkebunan oleh pengusaha swasta Barat.

Dalam mengendalikan daerah koloni, pihak kolonis menempuh beberapa cara. Salah satu cara yang ditempuh, menurut Soeharjo Hatmosoeprbo (1995: 55) adalah dengan “menempatkan pemerintahan kolonial di daerah jajahan”. Lebih lanjut dia mengatakan : Di Jawa yang kaya akan komoditi agraris untuk ekspor, maka perlu dieksploitasi sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya. Untuk tujuan itu di tanah koloni harus ada pemerintahan Eropa yang efisien dan terkontrol di samping pemerintahan bumiputera. Di Jawa pemerintahan bumiputera itu dikepalai oleh seorang bupati. Kedudukan bupati ini tetap dipertahankan, karena kekuasaan atas rakyatnya yang otoriter namun berwibawa, masih diperlukan.

Sistem perkebunan mulai masuk bersamaan dengan masuknya pengaruh dari Barat. Sistem ini merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Kehadirannya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya berhubungan erat dengan proses kolonialisme dan modernisasi, karena itu hubungan sejarah perkebunan dengan sejarah kolonialisme sangat erat. Sistem perkebunan dipandang sebagai cara yang tepat untuk diterapkan di negara-negara berkembang, karena di daerah itu memiliki tanah dan tenaga kerja murah yang melimpah, sehingga memungkinkan untuk dieksploitasi hasil kekayaannya untuk dijual di pasaran dunia. Di Jawa yang sangat subur tanahnya dan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang banyak dan murah, sangat potensial untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Hal ini kemudian menarik niat para kolonis Barat untuk membuka perkebunan-perkebunan yang menanam tanaman yang memang sangat laku di pasaran dunia pada saat itu, misalnya tebu, kopi, nila dan lain-lain.

Pada masa kolonial, di wilayah nusantara khususnya Jawa, banyak dibuka perkebunan-perkebunan oleh para pengusaha swasta barat, terutama dari Belanda. Hal ini merupakan akibat dari dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) Tahun 1870. Menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:80), “Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang peraturan tataguna tanah”. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo mengatakan:

Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan tentang tataguna tanah antara lain :

- Tanah milik rakyat tidak dapat dijualbelikan kepada nonpribumi.
- Di samping itu tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
- Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi nonpribumi memiliki hak guna tanah, ialah : (a) sebagai tanah dan hak membangun (*recht van opstal*, disingkat RVO); (b) tanah sebagai *erfpacht* (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.

Perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi kolonial yang ‘liberal kapitalistik’, karena mampu menghasilkan aneka komoditi ekspor yang dibutuhkan pasaran dunia, seperti gula, teh, kopi. Menurut Mubyarto (1991), negara-negara Eropa yang merupakan kekuatan kolonial besar seperti Inggris, Belanda, Portugis dan Spanyol, berusaha untuk menguasai daerah-daerah jajahan di Asia, Amerika Selatan dan Afrika untuk menghasilkan karet, gula, kelapa sawit, kopi, teh, Tanaman-tanaman perkebunan terakhir itu baru menguntungkan manakala dikerjakan oleh buruh yang berupah rendah bahkan tak berupah dan lahan berharga murah. Dengan pengelolaan seperti ini, keuntungannya yang diperoleh begitu besar, bahkan mampu mengangkat Negeri Belanda lepas landas.

Inilah alasan utama yang membuat Belanda mengubah strategi pengelolaan dan penguasaan tanaman komersial dari yang semula hanya melakukan perdagangan dengan rakyat yang bertindak sebagai produsen, menjadi pengelolaan yang berbasis korporasi. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha-pengusaha Belanda secara ambisius membangun secara besar-besaran korporasi yang memproduksi dan memperdagangkan tanaman komersial.

Penguasaan Belanda atas komoditas perkebunan, khususnya yang di kelola oleh korporasi, berakhir ketika terjadi pengambil alihan seluruh korporasi Belanda oleh pemerintah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan, yang secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan.

Untuk memastikan manfaat bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar Tahun 1949. Kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dalam proses nasionalisasi perkebunan, terlihat nyata jiwa patriotisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan kedaulatan ekonomi harus berada di tangan bangsa sendiri. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola perusahaan perkebunan tanpa tergantung pada keahlian bangsa Belanda.

Apabila berbicara tentang sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*Commercial agriculture*) yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (*European Plantation*), yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial.

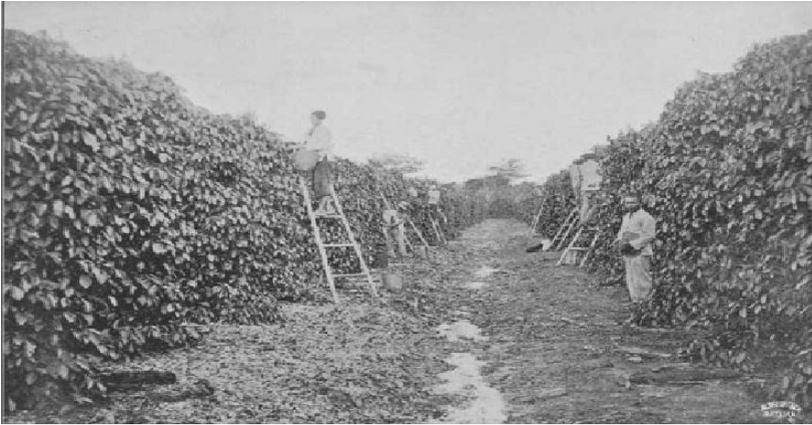
Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang. Oleh karena itu perkembangan perkebunan di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan proses modernisasi.

a) Perkebunan Lada

Lampung menjadi pemasok lada hitam. Lada yang berasal dari Lampung bahkan sudah dikenal sebelum Perang Dunia II. Pada 1970, produksi lada hitam asal Lampung mencapai 50 ribu ton dengan produktivitas 1,5-2 ton per hektar. Lampung sempat menjadi pemasok sebagian besar lada hitam dunia.

Semenjak 1987 hingga 2002, merupakan masa kejayaan lada putih Indonesia dengan produksi mencapai 62 ribu ton per tahun. Namun, pada 2005 kejayaan lada putih Indonesia mulai luntur dan tidak lagi menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia seiring dengan hasil perkebunan lada terus mengalami penurunan.

Gambar 1 : perkebunan lada di lampung



Sumber : Anonim dalam Ariwibowo, 2017 : 264

Sejarahnya pada abad ke- 15 Banten mulai menjalin hubungan kerjasama dan memperluas kegiatan ekonominya ke daerah Lampung (Mulianti, 2013 : 2). Kesultanan Banten melakukan kontrol yang kuat terhadap Lampung khususnya perkebunan lada. Sehingga Sultan Banten membuat peraturan yang berisis kebijakan-kebijakan kepada wakil daerah di Lampung (Wijayati, 2011 : 384). Pada Tahun 1653 Sultan Banten mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penduduk Lampung menanam lada 500 pohon per orang. Kebijakan ini dilakukan sultan setelah produksi lada di Banten mengalami penurunan pada abad ke-17, sementara kebun lada di Lampung terus bertambah (Imadudin, 2008 : 1437).

Berdasarkan sebuah Teks tahun 1663, diketahui bahwa Banten menerapkan sistem wajib tanam terhadap tanaman lada yang sangat mirip dengan sistem *cultuurstelsel* yang diterapkan secara paksa oleh Gubernur Van den Bosch saat diberlakukannya penjajahan Belanda Tahun 1830 (Masroh, 2015 : 67).

Disebabkan penghancuran perkebunan lada di sekitar ibukota Kesultanan Banten pada masa menjelang akhir keruntuhan kesultanan ini telah menjadikan wilayah Lampung hingga Palembang sebagai salah satu sentra komoditas lada di wilayah bagian barat Hindia Belanda, Kesultanan Banten mengalami kemunduran ketika timbul perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya dengan nama Sultan Haji (Wijayati, 2011 : 401). Perkebunan merupakan sub sektor andalan pada masa era Kolonial. Komoditas lada misalnya, telah menjadi satu komoditas dagang utama Tanggamus pada sekitar abad 16 (Hamzah, 1997 : 43). Daerah penghasil lada yang utama di Lampung adalah Tulang Bawang, Sekampung, Semangka (Tanggamus) dan Seputih (Imadudin, 2016 : 353).

Pada abad ke-19 lada bukan lagi menjadi komoditi utama namun harga jual tetap bertahan, untuk itu pemerintah kolonial mengambil kebijakan untuk membatasi wilayah produksinya. Lada Lampung merupakan lada hitam terbaik dikawasan Sumatera, untuk itu produksi di wilayah ini tetap bertahan (Masroh, 2015 : 69). Seiring berjalannya waktu lada Lampung mulai mengalami kemunduran terdapat beberapa penyebab dari kemunduran produksi lada di Lampung.

Pada Tahun 1930 perkebunan lada diserang penyakit kuning hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang kurang subur dan kekurangan pupuk serta kekeringan. Penyebab lainnya adalah pemeliharaan yang kurang hati-hati sehingga produksi menurun (Masroh, 2015 : 75). Akibatnya kualitas buah yang dihasilkan menjadi rendah dan semakin berkurang. Adanya komoditi perkebunan lain seperti kopi dan coklat mengakibatkan produksi lada semakin berkurang. akibatnya banyak petani lada yang beralih ke tanaman ekspor lain, seperti karet dan singkong.

Perdagangan di Lampung sebagian besar sangat mengandalkan jalur transportasi sungai, apalagi Anthony Reid dan Heather Sutherland mengatakan bahwa sungai menjadi salah satu faktor penting yang membawa Asia Tenggara pada masa gilang gemilangnya sekitar periode abad ke-16 hingga ke-18. Sungai bukan saja membawa produk-produk tanaman pangan seperti beras, garam, ikan, gula dan lainnya, tetapi juga produk-produk eksotis yang memiliki nilai jual tinggi bagi perdagangan seperti emas, kemenyan, damar, karet, lada, bahkan kain tenun maupun songket. Masuknya kolonialisme Eropa sejak periode abad ke-16 di Asia Tenggara tidak begitu saja menghapus perdagangan dan aktivitas pelayaran melalui jalur sungai. Lalu lintas sungai bahkan digunakan oleh bangsa Eropa untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka hingga ke daerah pedalaman. Di samping sebagai sarana untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik di pedalaman, pemerintahan Eropa yang mendominasi Asia Tenggara pada abad ke-17 hingga abad ke-20 juga menjadikan sungai-sungai ini sebagai jalur transportasi utama penduduk selain transportasi bagi perdagangan (*waterways*).

Sejak periode Kesultanan Banten pada abad ke-16 hingga pada akhir periode kolonial Belanda pada awal abad ke-20, Berbeda dengan sungai-sungai besar lain yang ada di Sumatera, di sepanjang Sungai Tulang Bawang tidak pernah ditemui suatu kekuatan lokal yang dominan. Hal ini disebabkan oleh dominasi kekuatan politik Kesultanan Banten sejak akhir abad ke-16 yang kemudian diteruskan oleh Belanda semenjak paruh akhir abad ke-17 Sumatera yang menjadi pusat politik dan ekonomi ketika itu.

Pada Tahun 1684 *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) berhasil menguasai perdagangan lada wilayah Tulang Bawang untuk pertama kalinya, disebabkan jalur perdagangan utama Lampung, Masuknya pengaruh VOC ke wilayah ini dilakukan setelah mereka berhasil menguasai dan memonopoli ekonomi dan perdagangan di Kesultanan Banten pada tahun 1682. Wilayah Tulang Bawang memang telah dikenal sebagai salah satu pusat penghasil lada di wilayah Selatan Sumatera. Lada mulai berkembang di wilayah ini sejak masa Kesultanan Banten, terutama sekitar akhir abad ke-16.

Sistem penguasaan lahan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, menerapkan sistem dualistis yakni sistem hukum Eropa dan sistem hukum adat. Pemerintah Kolonial Belanda, dalam sistem penguasaan lahan seperti ini, menggunakan dan memanfaatkan aturan penguasaan lahan dengan sistem kepala daerah, kepala marga, yang dipegang oleh pasirah. Dalam sistem seperti ini, pasirah, sebagai kepala adat marga dikendalikan dalam mengatur tentang adanya pengakuan status lahan adat masyarakat, di mana syarat ada tanah adat yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda pada saat itu.

Dalam menjual produknya VOC memerintahkan orang-orang dari kesultanan yakni “jenjen”. VOC membeli lada dari petani dengan harga yang rendah, sehingga petani berupaya untuk menyelundupkan hasil produksinya Untuk mengurangi angka penyelundupan barang maka Kesultanan Banten atas perintah VOC membuat Piagam Sukau (1691) dan piagam Bojong (1695). Untuk mengawasi perdagangan lada, didirikan benteng di Menggala pada Tahun 1738 yang diberi nama Benteng Albertus (Masroh, 2015 : 68).

Tahun 1830 sampai 1870 pemerintah kolonial mengambil kebijakan baru yaitu sistem tanam paksa. Pada Tahun 1830 tanaman perdagangan lain mulai dikenalkan secara luas yakni kopi, tebu dan indigo. Tanaman lada bukan lagi komoditas penting, sehingga dalam sistem tanam paksa lada tergolong dalam tanaman yang wajib ditanam dalam skala kecil. Dalam sistem ini lada yang dihasilkan oleh petani harus diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai pajak. Pada Tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Agraria, dan secara perlahan sistem tanam paksa dihapuskan. Undang-undang ini membuat wilayah Hindia Belanda terbuka untuk penanaman modal asing sehingga banyak perkebunan-perkebunan muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Pada abad ke-19 lada bukan lagi menjadi komoditi utama namun harga jual tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu lada Lampung mulai mengalami kemunduran (Masroh, 2015 : 69).

Seiring berjalannya waktu lada Lampung mulai mengalami kemunduran terdapat beberapa penyebab dari kemunduran produksi lada di Lampung. Pada Tahun 1930 perkebunan lada diserang penyakit kuning hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang kurang subur dan kekurangan pupuk serta kekeringan (Masroh, 2015 : 75). Penyebab lainnya adalah pemeliharaan yang kurang hati-hati dan menggunakan bibit tidak unggul menggunakan tanaman ulang di lahan marginal sehingga produksi menurun (Evizal, 2000 : 14). Adanya komoditi perkebunan lain seperti kopi dan coklat mengakibatkan produksi lada semakin berkurang (Masroh, 2015 : 75).

Pada Tahun 2005, Indonesia memang masih memimpin sebagai produsen lada terbesar dunia. Namun, setelah itu mulai tersingkir oleh Vietnam, karena negeri komunis ini mulai mengembangkan lada secara intensif. Semenjak Vietnam gencar mengembangkan lada, posisi ekspor lada Indonesia di pasar dunia menjadi turun. Penurunan ini tentu karena melemahnya daya saing akibat rendahnya produktivitas dan mutu lada lokal (Medialampung.com). Produksi lada Indonesia untuk lada hitam maupun lada putih hanya sebesar 91 ribu ton, dengan pangsa pasar sebesar 18,8 persen di pasar global pada 2013. Posisi Indonesia bergeser ke posisi eksportir terbesar kedua pada 2013. Padahal luas perkebunan lada Indonesia yang terbesar di dunia yakni 171 ribu hektar. Vietnam yang hanya memiliki lahan 80 ribu hektar mampu menghasilkan 130 ribu ton lada pada 2015 sebagai yang teratas.

Perkebunan lada di Vietnam terus meningkat, Pada 2003 luas lahan lada hanya 48 ribu hektar, lalu berkembang menjadi 50 ribu hektar pada 2012. Menurut Bloomberg, tahun ini diprediksi area perkebunan lada di Vietnam akan mencapai 100 ribu hektar. Adanya perluasan lahan perkebunan lada ini tentu secara langsung meningkatkan produksi lada di Vietnam. Dari 125 ribu ton lada pada 2011, dan diprediksi lada Vietnam akan meningkat hingga 150 ribu ton 2016.

Berlawanan apa yang terjadi dengan Vietnam, di Indonesia lahan perkebunan lada terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2006, luas area perkebunan lada Indonesia mencapai 192 ribu hektar. Pada 2007 turun menjadi 189 ribu hektar. Penurunan ini terus terjadi hingga pada 2015, area perkebunan lada tersisa 163 hektar. Dampaknya berpengaruh pada produksi lada Indonesia yang berfluktuasi.

Selain memberi pengetahuan tentang kualitas, Vietnam juga mengembangkan bibit unggul agar dapat menghasilkan lada-lada berkualitas. Untuk semakin menguatkan industri lada nasional, Vietnam membentuk Asosiasi Lada Vietnam atau *The Vietnam Pepper Association* (VPA). Adanya asosiasi ini tentu Vietnam akan semakin fokus pada pengembangan produksi lada.

Sedangkan di Indonesia, pemberian pengetahuan bertani kepada petani lada sangat minim. Pasokan bibit unggul dan bersertifikat sangat terbatas. Teknologi yang dimiliki petani Indonesia juga sangat minim. Ini tentunya akan berpengaruh tidak hanya pada produktivitas tetapi juga pada mutu lada Indonesia.

Sehingga jangan heran jika kemudian Vietnam muncul sebagai produsen lada dunia meski dengan lahan yang tidak mencapai setengah dari luas area perkebunan lada Indonesia.

Pemerintah memang harus bergerak lebih cepat untuk mengatasi rendahnya produktivitas lada lokal. Vietnam secara perlahan telah menjadi kompetitor Indonesia di segala lini ekspor seperti furnitur, kacang mete, hingga lada yang dahulu Indonesia sempat berjaya sebagai pusat rempah-rempah dunia. Mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia bisa dimulai dari lada.

Berikut adalah beberapa data mengenai perkembangan lada yang ada di Lampung menunjukkan berbagai peningkatan dan fakta bahwa Lampung sebagai produsen terbesar lada :

Tabel 2 : Produksi Lada Hitam Lampung 1857-1859

Tahun	Jumlah (kg)	Jumlah (pikul)
1857	401.135	6.685
1858	864.171	14.402
1859	188.579	3.141

Sumber : Masroh (2015-72)

Dari data ini dapat dilihat bahwa produksi lada di Lampung setiap tahunnya tidaklah stabil. *Kultur Verslag Van de Residentie Lampongsche Destricten Over 1863, 1865, en 1866* Dalam Masroh disebutkan bahwa hasil produksi lada yaitu:

Tabel 3 : Produksi lada tahun 1859-1866

Tahun	Jumlah (Pikul)
1859	3332
1860	4045
1861	4762
1862	8947
1863	10067
1864	14423
1865	7966
1866	5338

Sumber : Masroh (2015 : 72)

Stebbe dalam Masroh disebutkan bahwa produksi lada di Sumatra 1913 . dalam table ini ditegaskan bahwa Lampung merupakan produsen lada terbesar di Sumatra dengan produksi lada putih sebanyak 428.000 dan lada hitam 11.537.000 dengan total produksi 11.965.000 kg

Tabel 4 : Produksi Lada di Sumatera tahun 1913

Wilayah	Lada Putih	Lada Hitam	Total
Lampung	428.000	11.537.000	11.965.000
Aceh	3.000	3.378.000	3.783.000
Palembang	358.000	1.759.000	2.177.000
Sumatera Timur	-	898.000	898.000
Riau	496.000	223.000	719.000
Bengkulu	87.000	427.000	514.000

Sumber : Stebbe dalam Masroh (2015 : 72)

Lampung merupakan penghasil lada hitam terbesar di Sumatra. Kontribusi wilayah Lampung pada masa Kesultanan Bnaten dan Voc tidak diketahui pasti. Namun pada masa kolonial Lampung aset penting bagi pemerintahan dalam hal perdagangan lada. perkembangan perdagangan lada dapat dilihat dari jumlah produksi yang terus meningkat dan makin banyaknya lalu lintas perdagangan lada. Naik turunnya harga lada berkaitan dengan kondisi politik dan ekonomi dunia. Pada saat kondisi politik dan ekonomi stabil harga lada juga cukup stabil. Pada saat perang terjadi maka pendistribusian lada menjadi terganggu akibatnya harga lada menjadi naik.

Tabel 5 : Perdagangan Lada Lampung selama Tahun 1890 sampai 1918

Tahun	Harga Lada (per 1/2 kg)	Ekspor Lada Lampung dari Hindia Belanda (ton)
1890	21	9.426
1891	19	8.634
1892	15 ½	12.426
1893	14	9.299
1894	11	10.278
1895	11	8.717
1896	10 ½	15.479
1897	16 ½	14.532
1898	22 ½	14.431
1899	28 ½	12.873
1900	30 ¼	11.398
1901	30 ¾	10.673
1902	30	11.809
1903	31 ¼	14.078
1904	31	12.922
1905	26 5/8	13.604

1906	23 ½	20.130
1907	17 ½	16.945
1908	16 ½	20.201
1909	20 7/8	19.180
1910	18 7/8	26.180
1911	27 ¼	24.695
1912	26 1/8	26.541
1913	25 ½	19.045
1914	57 ¼	21.604
1915	50	22.249
1916	175	11.952

Sumber: Economisch-Statistische Berichten Woensdag 5 April 1922 dalam Masroh (2015 : 73)

Setelah kita lihat dan cermati dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dan tingginya tingkat produksi lada yang ada di Lampung bisa dibuktikan pada data ditabel, serta sangat meningkatnya baik jumlah maupun nilai tukar antara uang terhadap lada di Lampung pada masa kolonial. Inilah yang disebut Lampung sebagai produsen atau penghasil lada terbesar.

b) Perkebunan Kopi

Budidaya kopi merupakan salah satu budidaya tertua di Hindia Belanda yang diperkenalkan Bangsa Eropa. Setelah kopi diterima luas di Eropa, Kopi pun secara perlahan menjadi bagian dari imperialisme dan kolonialisme lama, seperti halnya yang dilakukan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mulai memasuki Indonesia pada pertengahan abad ke-16 dan mulai memperkenalkan kopi.

Menurut William H Ukers, disebutkan bahwa VOC merupakan pengimpor kopi pertama dalam skala besar. Setelah mendapatkan komoditas kopi, VOC membudidayakan kopi di Jawa dan Sri Langka pada Tahun 1711. Adapun Creutzberg dan van Laane (1987) mengungkapkan keterangan yang berbeda, kopi dibawa ke Hindia Belanda pada 1669, namun bibit kopi pertama ini punah karena kopi yang dikirim terkena bencana banjir di Batavia. Kiriman kopi selanjutnya tiba pada 1699 dan menjadi sumber bagi segala kopi yang tumbuh di Jawa dan di bagian-bagian lain kepulauan Nusantara sampai abad ke-21. (Creutzberg dan Van Laanen, 1987: 157).

Kopi menjadi komoditas unggulan di masa VOC dan di masa Hindia Belanda (1800-1942). Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, kopi dibudidayakan di Jawa melalui *Preangerstelsel* dan *Culturstelsel*, Seperti halnya gula, kopi ditanam oleh petani-petani bumiputera pulau Jawa di bawah paksaan pemerintah Hindia Belanda. Penanaman kopi tersebar mulai dari Banten, Karawang, Priangan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Probolinggo, Banyuwangi dan Madiun. Salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa yang dikembangkan bangsa Belanda. Untuk masa tertentu kopi dari Jawa sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu secangkir kopi lebih populer dengan sebutan “*Cup of Java*” atau “Secangkir Jawa”.

Pada tahun 1969 Belanda mendatangkan kopi dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Tanaman kopi tersebut berasal dari biji yang di bawa dari Yaman ke Malabar. Tanaman kopi yang tersebut ditanam di Kadawung, namun upaya ini gagal karena banjir. Tiga tahun kemudian Belanda mendatangkan kembali stek kopi dari Malabar. Upaya kali ini menuai sukses. Kopi tumbuh dengan baik di perkebunan-perkebunan di Jawa. Hasil produksinya menggeser dominasi kopi Yaman. Bahkan saat itu Belanda menjadi pengeksport kopi terbesar di dunia.

Memasuki masa Politik Etis, pembudidayaan kopi pun sampai Sumatera, salah satunya hingga ke daerah Lampung. Beriringan dengan proses kolonisasi (perpindahan penduduk) tahap pertama (berlangsung dari 1905 sampai 1911) di Lampung, para kolonis asal Jawa dan kolonis keturunan Tionghoa mulai membuka lahan dan mengembangkan tanaman kopi. Tanah Lampung yang subur serta luas memungkinkan pembudidayaan kopi dalam jumlah besar melalui perkebunan rakyat yang tersebar di mana-mana.

Perkebunan ini terus berkembang dari masa pemerintah Hindia-Belanda hingga masa Indonesia merdeka (Budiman, 2012 : 543).

Gambar 2: Atlas wilayah Lampung dan Sumatera bagian selatan.



Sumber : Departemen van Binnenlandsch Bestuur,1915 dalam Ariwibowo (2018 : 227)

Kolonisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial membawa pengaruh penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di wilayah Lampung. Transmigrasi ini diberikan berbagai fasilitas untuk membuka lahan-lahan untuk pengembangan tanaman produksi dan industri. Tercatat hingga Tahun 1932 para transmigrasi ini telah membangun sekitar 71.000 hektar hutan tanaman produksi di wilayah Lampung. Pertumbuhan penduduk akibat transmigrasi di wilayah Lampung juga turut meningkatkan konsumsi. Pemerintah kolonial kemudian membangun berbagai sarana irigasi dan pertanian agar tidak terjadi krisis pangan di wilayah ini akibat pertumbuhan penduduk (Ariwibowo, 2018 : 346). Apabila dibandingkan dengan Palembang maupun Bengkulu pengembangan budi daya kopi di Lampung cukup tertinggal. Menurut J.W.J. Wellan, tanaman kopi baru dibudidayakan

menjadi tanaman wajib bagi masyarakat Lampung pada dekade pertama abad ke-20. Sementara di Palembang budi daya kopi telah berlangsung sejak Tahun 1850-an (Wellan, 1932 : 108).

Perkebunan rakyat untuk tanaman kopi di Lampung pada periode kolonial sangat ditunjang oleh pertumbuhan dan perkembangan kolonisasi atau transmigrasi yang mulai dilakukan sejak Tahun 1905. Kopi menjadi komoditas penting selain lada, kapas, palawija, dan beras yang dibudidayakan oleh para transmigran (Ariwibowo, 2018 : 346). Semenjak itulah terjadi peningkatan pendapatan dari budidaya tanaman kopi di wilayah ini. Pada Tahun 1929 wilayah Karesidenan Lampung memperoleh sekitar f 4.604.000 dari ekspor perdagangan kopi. Budidaya tanaman kopi ini terus bertahan bahkan pada masa setelah malaise, kopi menjadi tanaman unggulan bagi wilayah Lampung. Hal ini terjadi akibat berkurangnya popularitas lada di pasar internasional serta wabah hama yang menyerang tanaman lada sehingga menyurutkan produksi lada di Lampung (Wellan, 1932 : 223).

Tabel 6. Produksi Kopi di Lampung dalam Rentang Periode 1923-1929

Tahun	Produksi Lada (Dalam Kilogram)	Nilai Produksi (Dalam Ribuan Gulden)
1923	1.482	824
1925	2.142	1.959
1927	3.278	2.333
1929	6.526	4.604

Sumber: Wellan, dalam Ariwibowo, 2018 : 340

Jenis tanaman budidaya kopi di Lampung khususnya Tanggamus adalah *Varietas Kopi Robusta* Hal ini karena sebagian besar para transmigran mengembangkan budidaya kopi robusta. Perkebunan kopi robusta memang telah mendominasi perkebunan kopi di wilayah Sumatera bagian selatan. produksi kopi robusta di Indonesia berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan. Meskipun memiliki harga yang terbilang lebih rendah dibanding jenis kopi arabika yang banyak tersebar di Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Indonesia bagian timur, namun kopi robusta memiliki keunggulan dalam daya tahan tanaman dari serangan hama dan penyakit, serta kemudahan dalam proses penanaman dan pemeliharaan. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk mendorong budi daya tanaman kopi robusta di wilayah Sumatra bagian selatan yang mencakup wilayah Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung (Wellan, 1932 : 258).

Perkebunan terkenal di Lampung adalah Kopi, hingga saat ini Lampung adalah daerah pengekspor kopi terbesar di Indonesia bahkan mencapai 70% dari keseluruhan ekspor kopi di seluruh Indonesia (Budiman, 2012 : 528). Kontribusi rata-rata sentra produksi kopi nasional menunjukkan bahwa Lampung merupakan sentra produksi kopi di Indonesia dibandingkan dengan Provinsi-provinsi penghasil kopi lainnya dengan persentase; Lampung (26%), Sumatra Selatan (21,03%), Bengkulu (8,49%), Sumatra Utara (8,3%), NAD (7,26%), dan Sulawesi Selatan (5,40%) (Lestari, 2017 : 1). Kopi yang dikembangkan di Indonesia adalah kopi Arabika dan Robusta. Kopi Robusta lebih berkembang di Provinsi Lampung (Incamila, 2015 : 260). Menurut BPS Provinsi Lampung (2014), areal kopi robusta di Lampung adalah 161.162 ha dengan produksi mencapai 133.234 ton. Sedangkan untuk Kabupaten penghasil kopi terbesar di Lampung memiliki areal lahan ; Lampung Barat seluas 60.382 ha, Tanggamus seluas 43.941 ha, dan Lampung Utara seluas 17.149 ha (Evizal, 2015 : 80).

c) Politik Etis

Perdagangan kolonialisme Belanda akibat tanam paksa mengalami kemajuan pesat. Kolonialisme Belanda di Indonesia tahun 1870-1900 telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan Belanda terhadap bangsa Indonesia selalu menguntungkan sepihak, yakni Belanda itu sendiri, Cina, dan Eropa pada umumnya. Situasi demikian menyebabkan munculnya kritikan terhadap pemerintahan maupun daerah jajahan Hindia Belanda.

Kritikan ini pada dasarnya adalah tentang sistem kolonialisme yang menguntungkan sepihak saja, sedangkan penduduk setempat hidup dalam kemelaratan.

Kemiskinan bangsa Indonesia semakin parah akibat eksploitasi kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang jauh tertinggal dari masyarakat Eropa dan Cina. Para pengusaha swasta menyadari bahwa kemiskinan penduduk Indonesia harus diatasi terlebih dahulu, sebelum tanah jajahan menjadi pasar yang menguntungkan. Masyarakat Eropa yang berpikiran modern sangat tersinggung dengan keadaan penduduk Indonesia yang semakin lama semakin merosot. Dari ketidakpuasan terhadap politik yang sedang berjalan muncul suatu orientasi baru.

Sebagaimana diketahui bahwa Kerosotan kesejahteraan Penduduk pribumi Pulau Jawa melatarbelakangi lahirnya Politik Etis. Ratu Wihelmina, dalam pidato pembukaan di parlemen Belanda mengatakan bahwa Pemerintah kolonial Belanda di penghujung era Sistem Liberal. Memiliki tugas Moral, di dalam pidato tersebut tersirat pengakuan bahwa Pemerintah Belanda memiliki Hutang Budi (*Ereschuld*) yang merupakan tujuan utama, yaitu memperbaiki ekonomi koloni dan penduduk Pribumi dengan melaksanakan pembangunan Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi (Hartono, M. 2014 : 1).

Perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia terjadi di Indonesia Indonesia. Politik baru tersebut disebut dengan "*ethische politic*", yang berarti politik haluan utama (Mulyono, 1968 : 99). Menurut Ricklefs, (2007:319). pada permulaan abad ke-20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam

sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan yang dilakukan sebelumnya. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini juga memiliki tujuan baru. Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dilotarkan dalam novel Max Havelaar (1860) dan dalam dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuah hasil. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas (Susilo, A. 2018 : 404)

Pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda, sudah pasti, tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik etis menuntun bangsa Indonesia kearah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajah Belanda. Politik Etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan. Tidak ada tekad baik dan keikhlasan hati yang tulus untuk melaksanakannya. Mereka berbuat demikian karena takut kritik dan takut kalau tetap membiarkan penderitaan penduduk pribumi terus menerus akan memicu timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus menerus. yang kolonialistik-eksploitatif.

➤ Pendidikan (Edukasi)

Dasar Politik Etis yang menjadi landasan pelaksanaan pendidikan Belanda agar pendidikan dan pengetahuan Barat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum tersebut disampaikan melalui bahasa Belanda dengan harapan bahasa tersebut dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Namun demikian masih ada perbedaan sekolah untuk rakyat setempat. Pemberian pendidikan setempat disesuaikan dengan keperluan mereka. Sistem pendidikan dengan sengaja dibuat menurut keadaan yang telah ada, yaitu pembagian golongan menurut keturunan bangsa dan status. Pembagian diubah pada tahun 1920, ialah golongan Eropa, golongan Bumiputera, dan golongan Timur Asing. Khusus untuk golongan Bumiputera dibuat pula pembagian status yaitu golongan bangsawan dan pemimpin adat, pemimpin agama (ulama) dan golongan rakyat biasa. Pemerintah Kolonial Belanda telah berusaha mempertahankan sistem kolonialnya melalui aristokrasi. Sistem pendidikan dan persekolahan pun dibuat menurut golongan yang ada dalam masyarakat. Penduduk Bumiputera hanya dapat menurut tingkat-tingkat pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan kedudukan sosialnya.

➤ Irigasi

Irigasi merupakan suatu daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman sesuai dengan fase pertumbuhannya (tepat jumlah dan waktunya) sehingga akan meningkatkan produktivitas dan hasil tanaman. Menurut Vaughn. E. Hansen.dkk. menyatakan bahwa irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman apabila terjadi kekeringan, menurunkan suhu dalam tanah, melunakkan lapisan keras tanah saat proses pengolahan tanah, membawa garam-garam dari permukaan tanah ke lapisan bawah sehingga konsentrasi garam di permukaan tanah menurun (Galih, R.D. 2017 : 758)

Pengelolaan irigasi hampir tidak berubah meskipun sistem kerajaan Hindu-Budha telah berganti menjadi kerajaan Islam. Masuknya bangsa Eropa ke Pulau Jawa pada abad ke-16 telah merubah budaya dan teknologi tentang sumberdaya air termasuk irigasi. Pemerintah Kolonial Belanda mulai melakukan pembangunan sistem irigasi teknis di Indonesia pada abad ke 19 Pembangunan itu tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan Sistem Tanam Paksa untuk memacu ekspor komoditi perkebunan ke pasar Eropa, contohnya seperti pembangunan irigasi di area Sungai Tulang Bawang dan Waduk di Way tebu Lampung itu adalah hasil dari politik etis itu sendiri.

Hingga seperempat pertama abad 20, pengembangan irigasi berkelanjutan merupakan bagian dari pengembangan kemanusiaan. Pengembangan aspek fisik irigasi (bangunan berikut jaringan irigasi) berada dalam kedudukan yang sama penting dengan aspek pengelolaan. Untuk dapat mengikuti pengembangan irigasi yang berkelanjutan secara benar diperlukan penekanan kembali keseluruhan makna arti irigasi sebagai ilmu teknologi dan juga dalam teknik pemakaian sehari-hari.

Perkembangan irigasi teknis di Indonesia lahir bersamaan dengan pelaksanaan tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk mengeruk keuntungan dan menambal hutang akibat Perang Diponegoro (1825-1830). Tebu merupakan tanaman budidaya yang paling memberikan keuntungan pada waktu itu, namun setelah wabah kelaparan pada 1840-1850-an, pemerintah kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya pada pengairan untuk padi. Para insinyur Belanda pada waktu itu mengagumi sistem irigasi tradisional yang telah berkembang di Jawa.

Era kolonial ini, pembangunan keirigasian sudah mulai diintervensi oleh kepentingan pemerintah kolonial. Pembangunan dan pengelolaan irigasi yang sebelumnya banyak dikelola oleh masyarakat, sebagian telah diasimilasikan dengan pengelolaan melalui birokrasi pemerintah. Teknologi yang digunakan dan kelembagaan pengelola juga sudah dikombinasikan antara kemampuan masyarakat lokal dengan teknologi dan kelembagaan yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Akibatnya manajemen pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi merupakan kombinasi antara potensi kapital sosial yang ada di masyarakat dengan kemampuan birokrasi pemerintah Kolonial. Pada masa itulah mulai timbul adanya buruh tani yang mengerjakan lahan-lahan pertanian atau perkebunan milik pemerintah.

Demikianlah bahwa sistem pengelolaan irigasi pada masa kolonial Belanda dilakukan dengan hampiran kekuasaan untuk pembangunan ekonomi negeri Belanda. Tetapi bagaimanapun juga pembangunan irigasi pada masa ini tetap memberi beberapa hal positif. Sistem pengelolaan irigasi pada masa kolonial Belanda telah memberikan dasar-dasar pengelolaan irigasi modern kepada kita. Paska Kolonial di Indonesia, kegiatan irigasi di Indonesia tidak banyak dilakukan oleh pemerintah, karena hanya memprioritaskan pembangunan politik yang diwarnai terjadinya polarisasi kekuatan politik internasional pasca perang dunia ke-2, serta suasana konfrontasi dengan negara tetangga waktu itu.

Gambar 3: Pembangunan Saluran Air di Bendungan, Untuk Irigasi Koloni Pertanian Jawa Di Metro, Distrik Lampung



Sumber: KITLV Leiden, Belanda, Nomor Arsip: 53673, Jan Van Der Kolk.

➤ Emigrasi

Kolonisatie adalah program perpindahan penduduk versi pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Program migrasi ini awalnya diberi nama *Kolonisatieproof* dan dijalankan sesuai dengan tuntutan Politik Etis bersama dengan program edukasi dan irigasi. Meski kelihatannya sebagai program yang peduli terhadap perbaikan kondisi masyarakat pribumi, tetapi sejatinya ketiga program tersebut dilaksanakan untuk kepentingan kolonialisme di Hindia Belanda yang telah sekian lama

meraup keuntungan sejak masa VOC dan Hindia Belanda (Dahlan, H.M. 2014 : 335).

Didahului dengan program *Kolonisatieproof* pemerintah Hindia Belanda melaksanakan perpindahan penduduk pada awal abad XX. Percobaan pertama yang sukses kemudian dilanjutkan dengan program perpindahan penduduk berikutnya yang disebut kolonisasi dan meluas tidak hanya di Lampung tetapi juga daerah lain di Pulau Sumatera, sampai akhirnya mereka menyerah kepada Jepang menjelang pertengahan abad XX. Dalam bidang migrasi ini.

Menurut pemerintah Hindia Belanda, daerah-daerah di Pulau Jawa sudah semakin sesak terutama di wilayah Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan perpindahan penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 1900 penduduk Pulau Jawa telah mencapai angka 28.746.638 jiwa kemudian meningkat drastis pada 1920 mencapai angka 34.984.171 jiwa.

Awalnya keinginan pemerintah adalah membatasi perpindahan penduduk di dalam Pulau Jawa saja yaitu dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang lebih jarang, setelah itu baru diperluas ke luar Pulau Jawa. Namun demikian atas berbagai pertimbangan terutama realisasi Politik Etis di bidang migrasi, kolonisasi (*Kolonisatieproof*) dengan tujuan menetap. Program ini akhirnya terealisasi pada tahun 1905. Peristiwa ini terjadi ketika Hindia Belanda diperintah oleh Gubernur Jenderal ke-63, yaitu Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909). *Kolonisatieproof*

ini memilih penduduk Desa Bagelen dari Karesidenan Kedu sebagai pionir migrasi dan Gedongtataan di Distrik Lampung sebagai daerah tujuan. Ketika pemerintah Hindia Belanda melaksanakan *Kolonisatie* di wilayah Karesidenan Lampung, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan sebanyak 155 kepala keluarga asal Desa Bagelen, Karesidenan Kedu.

Para migran tersebut ditempatkan di kawasan Gedongtataan. Mereka kemudian mendirikan Desa Bagelen untuk menamai kawasan mereka. Pemandahan pertama atau *kolonisatieproof* diikuti dengan migrasi berikutnya yang berlangsung hingga tahun 1911 dalam masa Gubernur Jenderal A.F.W. Idenburg. Perpindahan penduduk ke wilayah Karesidenan Lampung masa Hindia Belanda terbagi dalam tiga sistem dalam kurun waktu berbeda yaitu; sistem yang total dibiayai pemerintah dari Tahun 1905 hingga 1911 (setengah waktu dari usulan Heyting yaitu sepuluh tahun), system pinjaman bank dari Tahun 1912-1928, dan sistem *bawon* dari 1932 hingga 1941.

Gambar 4 : Museum Nasional Ketransmigrasian Desa Bagelen,
Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.



Sumber : Dahlan, 2017 : 347

Bab III

Dampak Perubahan Komoditas Lada Ke Kopi di Lampung (Tanggamus)

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Komoditas

Semakin terbatasnya pembukaan lahan hutan untuk pertanian maka budidaya komoditas berputar pada tata guna lahan pertanian yang sudah ada dan bergeser secara dinamis yaitu antar komoditas yang wilayah kesesuaian lahannya saling beririsan. Komoditas tradisional disuatu wilayah suatu seketika dapat bergeser atau beralih diganti oleh komoditas yang baru dikembangkan sehingga luas areal semakin berkurang(Sudarsono,2019: 116). Peralihan komoditas lada ke kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor itu adalah sebagai berikut :

a) Faktor Politik

Secara arti kata, politik berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu *politikos* (negara), sosial (*oikos*) rumah tangga atau manajemennya dan *nomos* aturan atau hukum, maka secara luas dapat diartikan sebagai “hukum manajemen

negara”. Adapun secara istilah adalah suatu strategi, kebijakan, dan program ketika Belanda menguasai Lampung, Belanda menerapkan strategi dalam mengakuisisi wilayah dan membangun sarana dan prasarana untuk kebutuhan pemerintah kolonial. Setelah kekuasaan politik atas wilayah stabil, maka dilanjutkan sebagai membangun dominasi ekonomi dalam berbagai sektornya melalui kebijakan politik ekonomi (Kristian, 2019 : 96). Kebijakan politik ini mempengaruhi pergeseran komoditas perkebunan dari lada ke kopi di Lampung khususnya Tanggamus. Memasuki masa Politik Etis, pembudidayaan kopi mulai masuk ke Pulau Sumatra salah satunya hingga ke daerah Lampung. Beriringan dengan program kolonisasi (perpindahan penduduk) tahap pertama (1905-1911). Para kolonis asal Jawa dan kolonis keturunan Tionghoa mulai membuka lahan dan mengembangkan tanaman kopi (Ariwibowo, 2012 : 528). Pembudidayaan kopi semakin berkembang hal ini dikarenakan iklim dan tanah di Lampung yang subur. Perkebunan kopi semakin berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa Indonesia merdeka.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan utama dari beralihnya komoditas lada ke kopi di Lampung Khususnya Tanggamus. Setelah kopi menjadi tanaman yang menjajikan pada masa kolonial. Kopi secara perlahan mulai menggeser komoditi unggulan Lampung yaitu lada. Sehingga secara perlahan mengusik perkebunan lada yang merupakan komoditas utama Lampung.

Apalagi penanaman dan perdagangan lada di Lampung terus memudar pada abad ke 20. Pada Tahun 1930 menyebar penyakit kuning sehingga menurunnya kualitas tanaman lada. produksi lada semakin mengalami penurunan.

B. Dampak Perubahan Komoditas di Lampung

Pengertian “Dampak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI Online, 2020).

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Menurut Scott dan Mitchell dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan (Kurnianto, 2017 : 61). Terdapat dampak yang apabila terjadi perubahan komoditas termasuk yang kami teliti lada ke kopi yaitu sebagai berikut :

1. Dampak Ekonomi

Ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti tata laksana rumah tangga. bisa kita mendefinisikannya sebagai : “Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karna perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kemakmuran” (Kurnianto, 2017 : 63).

Sebagai negara penghasil kopi terbesar di Asia, bagi Indonesia, ekspor kopi mempunyai peran cukup penting dalam pembentukan devisa, hal ini menjadi salah satu indikasi pentingnya kopi dalam perekonomian nasional, baik dari segi pembiayaan pembangunan maupun dari segi kesempatan kerja dan kesejahteraan. Dari Tahun 1971-1986 komoditi kopi rata-rata menyumbang 3,4% terhadap keseluruhan nilai ekspor. Dari aspek kesempatan kerja komoditi kopi telah membuka peluang bagi tidak kurang dari 5 juta petani maupun sebagai pekerja kebun. Dari aspek kesejahteraan rakyat, petani kopi Indonesia pada tanggal 1986 menerima bagian sebesar 61,11% dari harga (FOB), lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh petani Columbia, dan Pantai Gading, yang masing-masing menerima 36,65% dan 45,31% dari harga (FOB). Bahkan pada tahun 1983 dan 1984 penerimaan petani Indonesia adalah paling tinggi. (Retnandari, N.D dkk 1991 : 53).

Sesuai uraian dijelaskan bahwa betapa pentingnya peranan kopi dalam menyeimbangkan perekonomian yang ada di Indonesia sehingga apabila terjadi perubahan komoditas misalnya berakibat berkurangnya bahkan hilangnya salah satu penopang perekonomian penting rakyat dan perkerjaan rakyat Indonesia, karena meski memberikan menjanjikan dampak yang menggiurkan dalam suatu perubahan komoditas perlu adanya kebiasaan baru yang perlu diubah dan diperkenalkan hal ini butuh beberapa tahun bahkan puluhan tahun kedepan untuk mejadikan komoditas tersebut sebagai komoditas dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia.

Maka dengan demikian baik lada yang berubah ataupun kopi yang akan berubah nantinya, jangan sampai hal ini memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat sehingga bukannya membantu perekonomian malah menghasilkan masalah baru yang ada dimasyarakat bahkan Negara nantinya. Maka perlu adanya sadar akan kebutuhan dan pentingnya konsistensi suatu hasil pertanian dengan menjadi produsen utama disamping kita membuat suatu terobosan tanaman baru yang tidak membuat masyarakat sendiri kesulitan dalam menanam atau memasarkannya.

b) Dampak Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering

diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia (Koentjaraningrat, 1993 : 9).

Dari pembahasan sebelumnya dapat terlihat beberapa bentuk budaya dan pola hidup masyarakat Indonesia yang turut mewarnai budaya minum kopi di Negara ini. Beberapa diantaranya adalah :

- Secara umum masyarakat Indonesia suka untuk merasa senang, hal ini banyak diaplikasikan pada waktu senggang yang ada. Aktivitas yang lebih banyak digunakan adalah mengobrol dan akhirnya tumbuhlah rasa sosialisasi dan toleransi yang tinggi terhadap orang lain (Gumulya, D dkk 2017 : 161).

Gambar 5 : Kegiatan minum kopi masyarakat Indonesia



Sumber : Indonesia 500 Early Postcards dalam Gumulya (2017: 161)

Seiring dengan hal itu biasanya sosialisasi dilakukan di tempat makan ditemani tidak lain adalah kopi hal ini tercermin di beberapa sumber sejarah dan peristiwa lainnya. Dengan banyaknya kebiasaan tersebut yakni budaya minum kopi maka terjalinlah persaudaraan dan rasa toleransi sekaligus memahami antar masyarakat Indonesia bahkan dunia.

➤ **Meredakan Konflik**

Paska perjanjian damai 2005, popularitas budaya kopi di Aceh meningkat tajam. Budaya ini seakan menjadi ‘perantara’ berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat yang membungkus transisi pasca konflik di Aceh. Hal ini tampak dari sebaran warung kopi yang begitu massif di seluruh Aceh. Di Kota Banda Aceh saja terdapat 299 warung kopi (Bappeda Kota Banda Aceh 2016).

Pada konflik di Aceh yang terkadang timbulnya gesekan tampaknya memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan komunikasi sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Terutama akibat menjamurnya *keude kuphi* sebagai *platform* ruang publik yang memberikan akses berlakunya komunikasi sosial tersebut. Akses terhadap komunikasi ini menghadirkan kembali kebiasaan berkumpul dan berinteraksi, bahkan lebih bebas dan kritis daripada kondisi sebelumnya yang terhalang oleh ketakutan akan konsekuensi konflik bersenjata sebelumnya (Taqwadin A.D dkk. 2019 : 95).

Penelitian Taqwadin juga menyebutkan bahwa betapa mencekamnya suatu konflik, maka dengan adanya komunikasi yang terjalin cita-cita penyesalian konflik yang terjadi diharapkan bisa terlaksana. Dengan adanya budaya minum kopi ini diharapkan pula menjadi trend dihasilkan pula perdamaian yang ada di Aceh bahkan daerah lainnya termasuk Lampung yang sangat rawan akan konflik antar masyarakat.

➤ Budaya Ritual

Selain sebagai minuman pendamping saat bersosialisasi, kopi rupanya memiliki peran tersendiri dalam ritual adat di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Jawa. Salah satu ritual yang dilakukan di Keraton Solo yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis adalah memberikan sesajen pada Kyai Petruk untuk melindungi ruang makan di Keraton. Sesajen ini terdiri dari kelopak mawar putih, dupa, teh, dan kopi. Kopi dalam hal ini dipercaya sebagai minuman para dewa, yang digunakan untuk memberikan pencerahan dan koneksi pada dunia spiritual.

Gambar 6 : Ritual Memberikan Sesajen pada Kyai Petruk



Sumber : A Cup of Java dalam Gumulya (2017 : 163)

Meskipun dengan banyaknya gaya dan penawaran yang ada pada setiap budaya minum kopi sebenarnya budaya kopi yang ada di Indonesia mendapatkan banyak pengaruh dari Eropa, Cina, Melayu, dan budaya lokal (seperti Jawa, Medan, dan lain-lain); baik dalam hal pengolahan maupun dalam penyajian. Orang Indonesia merupakan orang yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan baik dengan budaya-budaya baru khususnya yang menjadi trend di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya cafe di kota-kota besar yang ada. Tingkat konsumerisme bangsa Indonesia juga tinggi. Warung kopi merupakan wujud pluralisme dan kesatuan bangsa Indonesia, dimana semua etnis dari berbagai macam latar belakang budaya dapat duduk dan menikmati kopi bersama, maka dengan demikian jangan sampai budaya yang telah turun temurun ini menjadi hilang dan akhirnya berganti ke budaya baru yang entah baik buruknya bisa kita rasakan

dalam waktu dekat. Dengan banyaknya pula program pemerintah saat ini dalam menggalakkan budaya minum kopi sampai ada yang namanya hari munim kopi maka kita pun sebagai masyarakat harus membantu dan mendukung rencana pemerintah ini dengan demikian terjalinlah pula rasa kedekatan antara masyarakat atau rakyat kepada pemerintah.

c) Dampak Sosial

Menurut Soemardjan dan Solaeman Soemardi dalam Soekanto (2001:21) menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa lebih dari 90% kopi Indonesia dihasilkan oleh petani rakyat dengan luas pemilikan lahan yang sangat bervariasi. Terlihat bahwa kopi merupakan semacam tabungan berjaga-jaga apabila keluarga tani memerlukan pemenuhan kebutuhan sekunder atau keperluan mendadak (Ratnandari, N.D dkk 1991 : 64-66).

Kesimpulan yang bisa didapatkan bahwa kopi berperan dalam tingkat kesejahteraan rakyat karena mampu menopang ekonomi keluarganya sehingga bisa membantu setiap kebutuhan yang mendadak, seperti kopi lada pun memiliki ciri dan proses panen yang sama yaitu satu tahun sekali, maka dengan adanya perubahan tersebut jangan sampai mengurangi atau bahkan menghilangkan peranan dari komoditas ini sebagai penopang kesejahteraan usaha keluarga dan akhirnya hilangnya ketentraman sosial yang berakibat munculnya masalah sosial lainnya.

d) Dampak Pembangunan

Sebagai negara penghasil kopi terbesar di Asia, bagi Indonesia, ekspor kopi mempunyai peran cukup penting dalam pembentukan devisa, hal ini menjadi salah satu indikasi pentingnya kopi dalam perekonomian nasional, baik dari segi pembiayaan pembangunan maupun dari segi kesempatan kerja dan kesejahteraan (Retnandari, N.D dkk 1991 : 53).

Peranan kopi dalam hal pembangunan Negara sangatlah penting apalagi tercatat sebesar 3,4% menyumbang terhadap keseluruhan nilai ekspor Indonesia besaran ini tdaiklah kecil dan hal ini perlu diberikan apresiasi termasuk peningkatan yang signifikan.

Menyikapi hal tersebut untuk mempertahankan nilai jual kopi Indonesia yang sementara ini dipengaruhi oleh harga maka Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM mencatat 2 variabel utama dalam perdagangan yang mempengaruhi harga kopi. Pertama, variabel eksternal, yaitu faktor yang bersifat internasional sangat erat pada kebijakan dalam ICO dan ICA. Kedua, variabel internal, yaitu berkaitan dengan mekanisme pemasaran dan usaha tani termasuk kesejahteraan para petani tersebut sangat mempengaruhi kualitas kopi dan harga.

Dengan demikian maka betapa pentingnya komoditas kopi yang ada di Indonesia ini termasuk apabila terdapat suatu pergantian komoditas betapa hancurnya nilai jula Indonesia bagi dunia, bukan tanpa sebab karena apabila pergantian ini dibiarkan misalnya perlu adanya tata ulang komoditas utama dan pembaharuan baru pada kebiasaan yang ada. Hal ini sudah ditunjukkan pada sejarah yang telah kita lalui betapa sebuah kerajaan besar yakni kerajaan Banten hancur atau bahkan

runtuh karena meremehkan pergantian suatu komoditas meskipun telah ada usaha dalam mempertahankannya namun faktor kolonisasi oleh Belanda menyebabkan cepatnya pergantian komoditas tersebut namun tidak dibarengi terhadap kesejahteraan petani Banten kala itu. Jangan sampai kemerdekaan saat ini terkolonisasi kembali dengan pergantian komoditas yang tidak terkendali dan akhirnya kesejahteraan petani menjadi sirna karena memikul beban pergantian komoditas dengan iming-iming harga tinggi atau bahkan kesejahteraan yang tidak pasti.

Bab IV

Penutup

Berdasarkan penjabaran pada bab III dapat dilihat bahwa dampak perubahan komoditi lada ke kopi di Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti Semakin terbatasnya pembukaan lahan hutan untuk pertanian maka budidaya komoditas berputar pada tata guna lahan pertanian yang sudah ada dan bergeser secara dinamis yaitu antar komoditas yang wilayah kesesuaian lahanya saling beririsan. Komoditas tradisional disuatu wilayah suatu seketika dapat bergeser atau beralih diganti oleh komoditas yang baru dikembangkan sehingga luas areal semakin berkurang. Peralihan komoditas lada ke kopi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: Faktor Politik, Belanda menerapkan strategi dalam mengakuisisi wilayah dan membangun sarana dan prasarana untuk kebutuhan pemerintah kolonial. Setelah kekuasaan politik atas wilayah stabil, maka dilanjutkan sebagai membangun dominasi ekonomi dalam berbagai sektornya melalui kebijakan politik ekonomi Kebijakan politik ini mempengaruhi pergeseran komoditas perkebunan dari lada ke kopi di Lampung khususnya Tanggamus.

Memasuki masa Politik Etis, pembudidayaan kopi mulai masuk ke Pulau Sumatra salah satunya hingga ke daerah Lampung. Faktor Ekonomi, Kopi secara perlahan mulai menggeser komoditi unggulan Lampung yaitu lada. Sehingga secara perlahan mengusik perkebunan lada yang merupakan komoditas utama Lampung. Apalagi penanaman dan perdagangan lada di Lampung terus memudar pada abad ke 20. Pada Tahun 1930 menyebar penyakit kuning sehingga menurunnya kualitas tanaman lada dan produksi lada semakin mengalami penurunan. Terdapat dampak yang apabila terjadi perubahan komoditas termasuk yang peneliti teliti lada ke kopi mulai dari Dampak Ekonomi yakni berakibat pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan daerah akibat terus bergantinya komoditas, kemudian dampak sosial yang mana berkurangnya nilai toleransi dan komunikasi apabila terus terjadinya pergantian komoditas ini seperti yang kita ketahui bahwa kebiasaan dan budaya minum kopi melekat di masyarakat Indonesia dari dahulu hingga saat ini

Daftar Pustaka

- Ariwibowo. G. A. 2018. Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan di Keresidenan Lampung Pada Priode 1856 Hingga 1930. *Jurnal Patanjala*. 10 (2) : 331-346.
- Bachri, B.S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Surabaya, *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10 (1) : 46-62.
- BPS Lampung. 2012. *Lampung dalam Angka*. 1982-1983. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- Budiman, H.G. 2012. Dinamika Industri Kopi Bubuk di Lampung (1907-2011), Bandung, *Jurnal Patanjala*. 4 (3) : 526-543.
- Dahlan, Halwi. M. 2014. Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa : Kolonisasi, Kokuminggakari, Dan Transmigrasi Di Provinsi Lampung (1905-1979). *Jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung* : 335-348

- Evizal, R. dkk. 2015. Ragam Kultivar Kopi di Lampung. *Jurnal Agrotrop*. 5 (1) : 80-88.
- Hartono, Mudji. 2014. Realisasi Politik Etis Di Bojonegoro Pada Awal Abad XX : Kajian Sosial Ekonomi. *Jurnal Fakultas Ilmu sosial UGM vol 1*. ISSN 1858-2621 : 1-22
- Imadudin, I. 2016 Perdagangan Lada Di Lampung Dalam Tiga Masa. Bandung, *Jurnal Patanjala*. 8(3) : 394-364.
- Irwanto, D. 2017. Malaise dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang,1929-1942. *Jurnal Lembaran Sejarah Volume 13 No 1* : 48-71. Galih, Rangga D 2017. Penerapan Politik Etis Di Surabaya Tahun 1911-1930. AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5*, No. 3 : 751-765
- Gumulya, D dan Helmi S.I. 2017. Kajian Budaya Minum Kopi. *Jurnal Dimensi*, Vol.13- No.2 : 153-172.
- KITLV Leiden, Belanda, Nomor Arsip: 53673, Jan Van Der Kolk.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kristian, Y. 2019. *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942*. Uwais Inspirasi Indonesia. Anggota IKAPI.
- Kustyawati, M.E. dkk. 2017. Produksi Kopi Terintegrasi Untuk Meningkatkan Usaha Srikandi di Kab.Tanggamus. Bandung, *Jurnal Batoboh*. 2 (1) : 45-56.

- Kurnianto, BT. 2017. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita* : 55-84
- Lestari, O. dkk. 2017. Analisis Usaha Tani dan Efisiensi Permasalahan kopi (*Coffea sp*) Di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal JIIA. Volume (5)* 1 : 8.
- Masroh, L. 2015. Perkebunan dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1816-1942. Malang, *Jurnal 66 Sejarah dan Budaya*. 9 (1) : 64-78.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nopriyandi, R. dan Haryadi. 2017. Analisis Ekspor Kopi Indonesia. Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomi*. 12 (1) : 1-8
- Notosusanto, N. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah kontemporer*. Inti Indayu Press. Jakarta.
- Nurleli. 2008. *Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan di Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Perdana, Y. dkk. 2019. Dinamika Industri Gula Sejak *Cultuurstelsel* Hingga Krisis *Malaise* Tahun 1830 – 1929. *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2)* : 227-242
- Retnandari, N.D dan Tjokrowinoto, M. 1991. *Kopi : Kajian Sosial-Ekonomi*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak

- Siswoyo, T. Ekwandari, Y.S dan Wakidi. Pengaruh Malaise Terhadap Perkebunan Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1930-1940. *Jurnal FKIP Unila* 1-12.
- Sudarsono, M. dan Erwanto. 2013. *Revitalisasi Lada Lampung Sebagai Komoditas Warisan*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Susilo, Agus. 2018. Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA* Volume 6, Nomor 2, ISSN 2337-4713 : 403-416
- Wawancara dengan Bapak Masmu'i Sebagai petani lada yang beralih ke tanaman kopi. Tanggamus, Pada tanggal 9 November 2019.

Glosarium

Afdeling	: bagian/divisi
Agraria	: urusan pertanahan/tanah pertanian
Arsip	: Tempat penyimpanan berkas (program atau data)
Asosiasi	: persekutuan dagang
<i>Cultuurstelsel</i>	: budaya
Devisa	: kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium
Eksploitasi	: pemanfaatan untuk keuntungan sendiri
Ekspor	: pengiriman barang dagang keluar negeri
Eksportir	: orang/instansi yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas
Etimologis	: cabang ilmu linguistik fasilitas sandang pangan untuk 2 tahun pertama.

Fluktuasi	: ketidaktepatan/guncangan/tidak stabil
Historiografi	: kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah
Historis	: Sejarah
ICA	: organisasi yang dibentuk melalui departemen luar negeri Amerika
ICO	: (coin offering) mekanisme pengalangan dana
Interpretasi	: penafsiran terhadap sesuatu
Karesidenan	: daerah administratif yang dikepalai oleh residen karya sejarah mengenai topik tertentu.
Kolonisasi	: perpindahan penduduk kedaerah koloni.
Kompetitor	: orang yang bersaing
Korporasi	: badan usaha yang sah dimata hukum
Kritik Ekstern	: kritik yang dilakukan dari eksternal/luar
Kritik Intern	: kritik yang dilakukan dari internal/dalam
Kronologis	: berkenaan dengan kronologi, menurut urutan waktu
Liberal	: bebas
Literatur	: dokumen/bacaan menuju negara lain pembayaran transaksi perdagangan antar negara.
Penjajah	: orang yang terlalu menguasai/menjajah bangsa lain
<i>Platform</i>	: mimbar

- Preangerstelsel* : anam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah Parahyangan pada tahun 1720.
- Primadona : unggulan/ utama produksinya ke tangan penjajah Belanda.
- Punggawa : gelar untuk seorang pengurus lokal tradisional, yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia.
- Sentra : tempat yang menjadi pusat.
- Transmigrasi : suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia.
- Varietas : kelompok tanaman wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduk dengan diberikan yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Indeks

A

Afdeling, 17, 72
Agraria, 21, 23, 31, 72
Arsip, 72
Asosiasi, 33, 72

C

Cul-tuurstelsel, 72

D

Devisa, 72

E

Eksploitasi, 72
Ekspor, 36, 70, 72
Eksportir, 72
Etimologis, 72

H

Historiografi, 7, 72
Historis, 72

I

ICA, 62, 73
ICO, 62, 73
Interpretasi, 6, 73

K

Karesidenan, 21, 50, 73
Kolonisasi, 39, 68, 73
Kompetitor, 73

L

Liberal, 43, 73
Literatur, 73

P

Penjajah, 73

Platform, 73

Preangerstelsel, 38, 73

Primadona, 73

Punggawa, 74

S

Sentra, 74

T

Transmigrasi, 4, 68, 74

V

Varietas, 2, 41, 74

Tentang Penulis



Muhammad Rizkillah Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara keturunan Suku Jawa Banten. Pemuda lahir dari pasangan Bapak Masmu'i & Ibu Rokayah yang merupakan petani di Daerah Kabupten Tanggamus. Penulis beralamat di Pekon Sukadamai RT.02/RW.02, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Penulis merupakan alumni dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah (2005-2011), kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama MTS N Model Talang Padang (2011-2014), kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA N 1 Kota Searang (2014-2017) dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan starta 1 di Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ips, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN(Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi).

Selama duduk di bangku sekolah, penulis juga meraih beberapa prestasi. Penulis juga aktif pada kegiatan ekstrakurikuler Marawis serta pernah meraih prestasi menjadi juara 1 tingkat Provinsi pada Tahun 2016. Pada saat kuliah penulis juga aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti staf usaha KOPMA (Koperasi Mahasiswa) Universitas Lampung (2019), anggota Organisasi eksternal GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) (2019), serta Ketua Bidang Dana dan Usaha FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa) Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Dalam menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah Penulis mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang berjudul “Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten Tanggamus “ (2020), merupakan karya perdana oleh penulis dan tim penelitian Sejarah Lokal.



Fera Verianti merupakan anak pertama dari dua bersaudara keturunan Suku Jawa. Penulis lahir dari pasangan Bapak Sandianto dan Ibu Sriani pada 30 Maret 2000. Penulis beramat di Dusun Pulausari RT:01/RW:02, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten

Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Penulis Merupakan alumni dari Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu (2006-2012), Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah di SMP Negeri 2 Labuhan Ratu (2012-2015), kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu (2015-2018) dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata 1 di Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama duduk dibangku sekolah, penulis juga meraih beberapa prestasi dikelas. Penulis juga aktif pada kegiatan ekstrakurikuler Taekwondo serta pernah meraih prestasi menjadi juara III tingkat kabupaten pada tahun 2015. Pada saat kuliah penulis juga aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti staf ahli bidang sosial BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (2018), anggota bidang pendidikan (HIMAPIS) Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (2018) serta Sekertaris Bidang Hubungan Mahasiswa dan Alumni FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa) Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Dalam menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah penulis mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang berjudul “Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada Ke Kopi Era Kolonial Di Kabupaten Tanggamus” (2020) merupakan karya perdana oleh penulis dan tim penulisan sejarah lokal.



Hilman merupakan anak pertama dari 6 bersaudara keturunan Lampung. penulis lahir dari pasangan bapak Ismail dan Ibu Mislina Indah, yang merupakan petani di daerah Lampung Utara. Penulis beralamat Dusun I Sakal RT.002/RW.001 desa Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten

Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Penulis merupakan alumni dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Raya (2005-2011), kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Abung Pekurun (2011-2014), dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Abung Pekurun (2014-2017). Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan sebagai mahasiswa Bidikmisi.

Selama duduk dibangku sekolah, penulis meraih beberapa prestasi dikelas, penulis juga aktif pada kegiatan ekstrakurikuler Karate, kemudian pada strata SLTA melanjutkan pendidikan beladiri ke pencak silat yakni Setia Hati Terate. Pada saat kuliah penulis juga aktif di beberapa organisasi seperti anggota bidang HIMAPIS (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Sosial), ketua bidang Kerohanian FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah), penulis juga mengikuti organisasi eksternal yaitu kabid PPPA HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat FKIP Universitas Lampung hingga mengikuti pendidikan LK2 Nasional.

Dalam menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah penulis mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku yang berjudul “Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung : Lada Ke Kopi Era Kolonial Di Kabupaten Tanggamus”. Merupakan karya perdana dan pertama penulis dengan tim penulisan sejarah. Semoga buku ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca khususnya masyarakat Lampung. Terima kasih...

Selamat membaca...!!



Yusuf Perdana lahir di Jombang pada 26 Oktober 1993. Ia menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Surabaya di Program Pendidikan Sejarah (2011-2015) kemudian melanjutkan pendidikan Magister Universitas Sebelas Maret di Program Studi Pendidikan Sejarah (2016-2018).

Saat ini ia mengabdikan diri di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung sejak tahun 2019. Skripsi yang ditulis semasa menempuh pendidikan strata 1 adalah "Koperasi Petani Tebu Rakyat Lamong Jaya 1999-2004" dan Tesis yang ditulis masa menempuh magister berjudul "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA (Studi Kasus SMAN 3 Surakarta)", ia telah melakukan penelitian (2019) dengan judul penelitian "Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA YP Unila", serta Buku Tunggalmunya Mutiara Hitam Lampung: Lada Ke Kopi Era Kolonial Di Kabupaten Tanggamus merupakan buku pertama yang dibuat bersama mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Lampung sebagai salah satu luaran dalam ajang Program Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai Tahun 2019 ia merupakan salah satu dosen yang aktif dalam mendampingi kreativitas mahasiswa baik dalam Ajang LKTI hingga PKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.